



# LAPORAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut

TAHUN  
**2022**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat diselesaikan pada waktunya. LAPKIN tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LAPKIN dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LAPKIN ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LAPKIN ini oleh setiap jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 24 Januari 2023



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terdiri 4 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan Kepala Bidang Komunikasi. Sedangkan Esselon IV sejumlah 4 Jabatan (2 Kasubbag dan 2 Kasi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Visi (Tanah Laut yang Berinteraksi) dan Misi Bupati Tanah Laut, **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran Meningkatnya pemanfaatan SPBE

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi); Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi; Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian; Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja; dan Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD. Strategi yang disusun untuk mengembangkan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan e-government; Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi; Meningkatkan cakupan media informasi publik; Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi; Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah; Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut; Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen; Menyediakan data statistik sektoral daerah; Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD. Adapun program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada kualitas layanan e-Government, yang diukur keberhasilannya melalui

Indikator Kinerja indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengacu pada Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai/indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini sebesar **3,11** dengan predikat penilaian **baik**. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2022 berdasarkan pada 5 program, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,75	3,11	113,09%
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9%	10%	112,36%
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarluaskan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20%	22,5%	112,5%
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan	Persentase tata kelola administrasi umum dan	100%	100%	100%

	kepegawaian	kepegawaian tertib dan tepat waktu			
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	84 nilai	90,11 nilai	107,27 %
		Nilai SAKIP SKPD	81 nilai	76,84 nilai	94,86%
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	100%	100%	100%

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dari Anggaran Rp. 10.474.476.919,- terealisasi sebesar Rp. 9.517.772.688,- (90,87%), dan fisik 99,49%. Realisasi anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp. 555.056.000,- terealisasi 562.424.000,- (101,33%).

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana komunikasi dan informasi guna menunjang pelaksanaan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pengembangan dan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	5
C. Isu Strategis	14
D. Produk dan Layanan	15
E. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Visi RPJMD	18
B. Misi RPJMD	18
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
D. Indikator Kinerja Utama	24
E. Perjanjian Kinerja	24
F. Program dan Kegiatan	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	32
1. Sasaran RPJMD	32
2. Eselon II (Kepala Dinas)	36
3. Eselon III (Sekretaris)	45
4. Eselon III (Kepala Bidang)	57
5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)	81
B. Akuntabilitas Keuangan	112
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022	112
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	115
3. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	116
4. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan 2022	117
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Strategi Peningkatan Kinerja	127

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Visi Bupati Tanah Laut **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TErata, Religius, AKtual, SInergi)”** melalui pelaksanaan program/kegiatan pada Telaahan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yakni: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pelaksanaan **Misi (1)**

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan peran pers yang bebas, membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informasi antara lain adalah untuk mendorong pemberdayaan potensi masyarakat. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dan menciptakan keterbukaan informasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers yang kondusif bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam era globalisasi informasi. Oleh karena itu

secara konsisten, segenap komponen bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut perlu turut serta mendapatkan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian kebebasan di bidang informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut;
3. Terwujudnya inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
4. Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
5. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut.

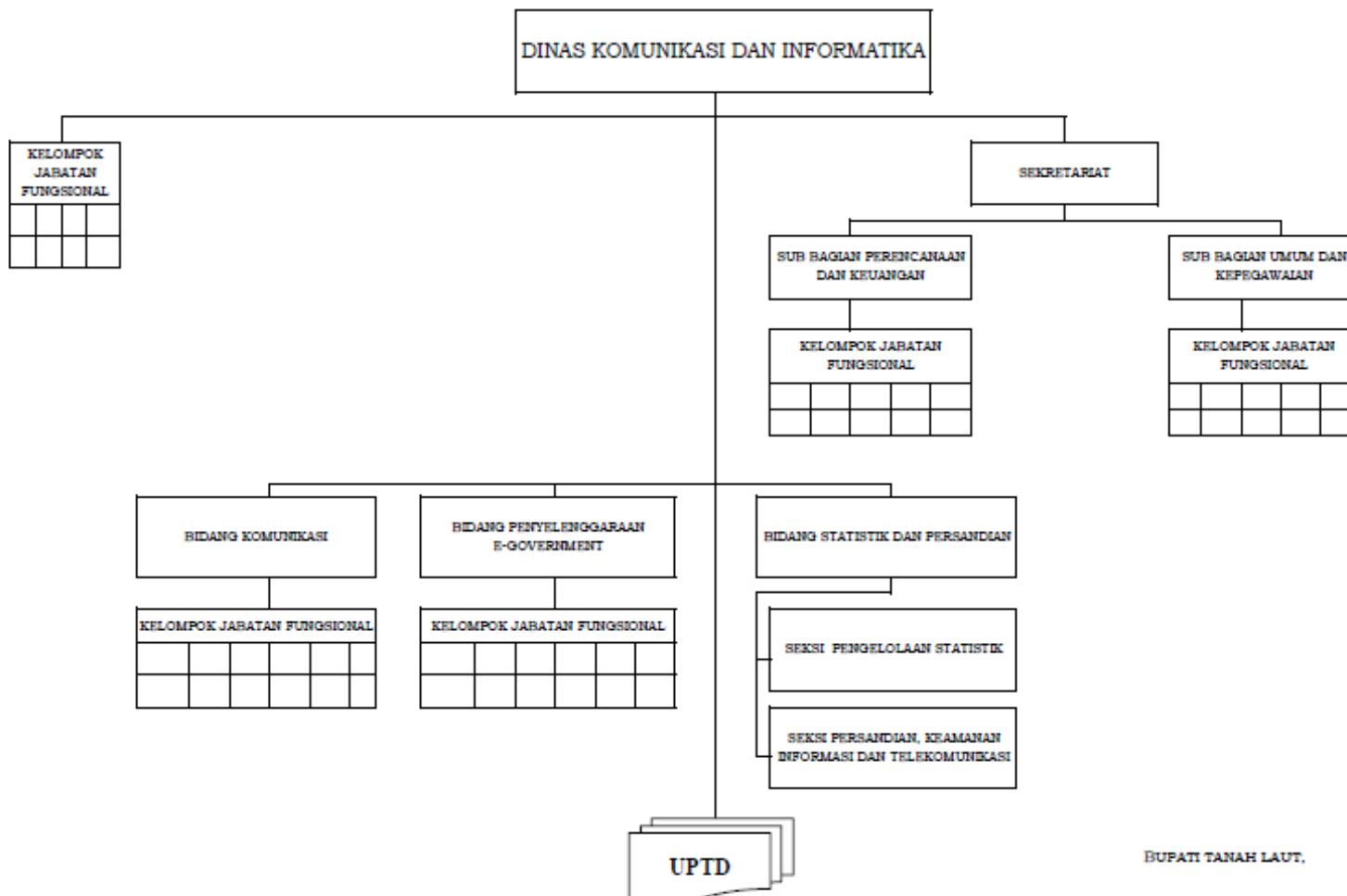
## **B. Struktur Organisasi Tugas dan fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diperbaharui pada tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
  - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis

### **Kepala Dinas**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Sekretariat**

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi dari:**

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bidang Komunikasi**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
  - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;

- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Penyelenggaraan E-Government**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
  - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Statistik dan Persandian**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
  - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
  - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:**

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

### **Seksi Pengelolaan Statistik**

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

### **Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 19 orang tersebut, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 0 orang (tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas Sekretaris), Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 4 orang, staf pelaksana sebanyak 11 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			0			0
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kepala Seksi				4		4
5	Staf PNS					11	11
	<b>JUMLAH</b>		1	3	4	11	<b>19</b>

Golongan III menempati jumlah terbanyak di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 orang, diikuti golongan II sebanyak 6 orang, golongan IV sebanyak 3 orang serta

ditambah tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas			1					1
2	Sekretaris			0					0
3	Kepala Bidang		1	2					3
4	Kasubbag/Kasi			4					4
5	Staf			4	5	2			11
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 1 orang memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Bidang 1 orang. Yang memiliki pendidikan S1/D4 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Terkait dengan LAPKIN, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

## C. Isu Strategis

Isu-isu strategis terkait pengembangan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan permasalahan, sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

#### **D. Produk dan Layanan**

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Penyiaran iklan layanan masyarakat
- b. Peliputan dan penyiaran
- c. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi)
- d. Pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi
- e. Pengendalian hak akses data
- f. Pemeliharaan dan akses data center
- g. Layanan lapor.go.id Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- h. Manajemen dan akses data jaringan (*network*)
- i. Pembuatan domain *website* resmi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Desa dan organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- j. *Co-Location* / Penempatan server dan hosting aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- k. *Back-up dan restore database server* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- l. *Update website*
- m. Layanan data sektoral
- n. Tata kelola berita sandi

## **E. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2022 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

1. DAFTAR ISI
2. RINGKASAN EKSEKUTIF

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi RPJMD

- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II (Kepala Dinas)
  - 3. Eselon III (Sekretaris)
  - 4. Eselon III (Kepala Bidang)
  - 5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 3. Cascading/Pohon Kinerja
- 4. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
- 5. Matrik Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **Rencana Strategis (Renstra)**

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

#### **A. Visi RPJMD**

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI  
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

#### **B. Misi RPJMD**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.  
**Tujuan** : 1. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut  
**Sasaran** : 1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut  
1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi  
1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
  
2. **Misi 2** : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.  
**Tujuan** : 2. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut  
**Sasaran** : 2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi
  
3. **Misi 3** : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).  
**Tujuan** : 3.1 Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut  
3.2 Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan  
3.3 Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut  
**Sasaran** : 3.1.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut  
3.2.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)  
: 3.3.1 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian  
: 3.3.2 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja

: 3.4.1 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,75
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarluaskan	100 %
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20 %
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD Nilai SAKIP SKPD	84 nilai 81 nilai

10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	100 %
----	--	--------------------------------------	-------

Berikut diperlihatkan tabel tujuan, indikator, target, sasaran, indikator dan target 5 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.2 Tujuan, indikator, target, sasaran, indikator, target 5 tahun Sesuai

Renstra

No .	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya tata kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan	2,8	3.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
			100%	3.2 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
			100%	3.3 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik	100%	1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarluaskan	100%	100%	100%	100%	100%
				1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %

		Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi	100 %	1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4%	50%	20%	20%	7,6%
3.	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut	Persentase inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100%	3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terlaksananya pemenuhan tata kelola pemerintahan di SKPD	100%	3.5 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	-	80 nilai	82 nilai	84 nilai	86 nilai
5.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	80%	100%	100%

Pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan target kinerja sehingga terjadi perbedaan antara target yang ada di Renstra dengan target pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika terutama pada indikator kinerja utama dinas yang disebabkan adanya indikator yang terealisasi pada tahun 2021 telah melebihi besaran target pada tahun 2022 sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian target kinerja pada tahun 2022. Berikut tabel target kinerja yang mengalami perubahan sesuai dengan Renja Tahun 2022.

Tabel 2.3 Perubahan target kinerja tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target pada Renstra	Perubahan Target pada Renja
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,6	2,75

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran strategis adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
		1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Hasil Penilaian SPBE dari Menpan RB	Dinas Kominfo

#### E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang telah disepakati baik oleh Pejabat Eselon II,

Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

**Perjanjian/Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2022**  
**(Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.75

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.000.965.788,-
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2.420.881.290,-
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp 2.952.853.600,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 49.805.090,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 49.971.151,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 10.474.476.919,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi utama dan kepegawaian	1. Persentase tata kelola administrasi utama dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai RB SKPD 3. Nilai SAKIP SPKD	84 nilai 81 nilai

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.000.965.788,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 5.000.965.788,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah	100 %
2.	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	2. Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.096.250.150,-
			Pelayanan Informasi Publik	324.631.140,-
<b>Jumlah</b>				<b>2.420.881.290,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %
2.	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2. Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
3.	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	3. Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600,-

		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000,-
		Jumlah		2.952.853.600,-

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun  
2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	1. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20 %
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	2. Persentase statistik sektoral daerah	100 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Koordinasi dan Singronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	49.805.090
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151
		Jumlah		99.776.241

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi	1. Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 Berkas
		2. Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang
		3. Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan
		4. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area	8 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.339.079,-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.939.516,-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	16.809.464,-
			Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.925.151,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.596.970
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.983.593,-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	111.674.298,-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.417.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>1.170.685.071,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	1. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun.	2 dokumen
		2. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun.	4 dokumen
		3. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun.	1 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000,-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717,-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>3.830.280.717,-</b>

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan  
Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah  
Laut Tahun 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut	1. Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi
		2. Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah	1 buku
		3. Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen Aplikasi Satu Data Tanah Laut	20 orang

**Perjanjian/Penetapan Kinerja Kepala Seksi Persandian, Keamanan  
Informasi dan Telekomunikasi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun  
2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	1. Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	20 SKPD
		2. Jumlah aplikasi Sistem (web service API) tandatangan digital terpusat	1 Aplikasi

**F. Program dan Kegiatan**

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 17.420.000,-**

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.900.000,-
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.520.000,-

**2. Adminitasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.812.860.717,-**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.808.380.717,-
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 4.480.000,-

**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 267.088.059,-**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 5.339.079,-
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 35.939.516,-
- c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 16.809.464,-
- d) Penyediaan Bahan / Material Rp. 13.000.000,-
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 196.000.000,-

**4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 719.522.121,-**

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 124.925.151,-
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 594.596.970,-

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 184.074.891,-**

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 56.983.593,-

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sebesar Rp. 111.674.298,-
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 15.417.000,-

**6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.420.881.290,-**

- a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 2.096.250.150,-
- b) Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 324.631.140,-

**7. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 2.881.153.600,-**

- a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.881.153.600,-

**8. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 71.700.000,-**

- a) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar Rp. 71.700.000,-

**9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49.805.090,-**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebesar Rp. 49.805.090,-

**10. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49.971.151,-**

- a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 49.971.151,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target sasaran strategis RPJMD dan perjanjian kinerja tahun 2022. Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut diukur dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target untuk setiap indikator sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana hasil proses penyelarasan cascading kinerja oleh Tim Sakip. Regulasi kinerja dilakukan pada setiap pimpinan, mulai dari Eselon II (Kepala), Eselon III (Sekertaris dan Kepala Bidang) dan Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi).

Dalam penyusunan penilaian kinerja, perhitungannya persentase pencapaian secara umum, menggunakan rumus pembilang (target) dibagi dengan penyebut (realisasi) dikali 100%.

#### **1. Sasaran RPJMD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk tahun 2018-2023 telah menetapkan beberapa sasaran strategis. LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran 2022 adalah Laporan Kinerja Dinas yang merupakan tahun ke ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan keadaan, Renstra dibuat untuk setiap sasaran dapat lebih dari satu indikator kinerja sasaran dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan indikator kinerja yang

akan dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sesuai sasaran strategis yang akan diketahui keberadaannya.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokan Capaian Kinerja

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I	> 90 %	Sangat Memuaskan
II	81% - 90%	Memuaskan
III	71 % - 80 %	Sangat Baik
IV	61 % - 70 %	Baik
V	51 % - 60 %	Cukup
VI	31 % - 50 %	Kurang
VII	0 - 30 %	Sangat Kurang

Berikut diperlihatkan tabel realisasi capaian Sasaran Strategis

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TAHUN 2022			KET
					Target	Realisasi	Percentase Capaian	
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,21	2,75	2,75	3,11	113,09 %	Kategori Baik
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17,8 %	22,5 %	8,9 %	10 %	112,36 %	
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarluaskan	118,93 %	97,33 %	100 %	100 %	100 %	
5	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	27 %	27 %	27 %	100 %	
6	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4 %	2,4 %	20 %	22,5 %	112,5 %	
7	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	103 %	100 %	100%	100 %	100 %	
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD	-	84,05 nilai	84 nilai	90,11 nilai	107,27 %	Kategori BB
		Nilai SAKIP SKPD	72,58 nilai	77,85 nilai	81 nilai	76,8 nilai	94,81 %	Kategori BB
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase statistik sektoral daerah	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	
	<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN</b>						103,64 %	<b>Kategori Sangat Memuaskan</b>

Hasil perhitungan persentase rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah **103,64 %** dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**. Meskipun demikian, capaian yang diperoleh pada tahun ini harus tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemeritahan yang baik (*good governance*).

## 2. Eselon II (Kepala Dinas)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut dengan indikator kinerja utama Indeks SPBE, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya pemanfataan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,75	3,11	2,8

- Uraian dan Analisa Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai target Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, maka dapat dibuat tabel 3.2 mengenai Capaian Indikator Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021		2022		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE	3,00	2,75	2,75	3,11	Indeks

Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya terdiri dari 1 (satu) kinerja utama, yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,21	2,75	2,75	3,11	113,09 %

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi SPBE tahun 2022

### Hasil Evaluasi SPBE 2022

Nama Form	:	Evaluasi SPBE 2022
Tahun	:	2022
Deskripsi	:	Evaluasi SPBE 2022
<b>Pemerintah Kab. Tanah Laut</b>		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
<b>Indeks SPBE</b>	:	<b>3,11</b>
<b>Predikat SPBE</b>	:	<b>Baik</b>

### Nilai Indeks

<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	:	3,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3,8
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>		
Perencanaan Strategis SPBE	:	3,67
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3,6
Penyelenggara SPBE	:	2
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	:	1,32
Penerapan Manajemen SPBE	:	1,63
Audit TIK	:	1
<b>Domain Layanan SPBE</b>		
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3,83

### Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, diperoleh nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan indeks 3,11 (kategori Baik). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik. Perolehan nilai tersebut jika dibandingkan dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berada di urutan terbaik ketiga setelah Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Meskipun ada penurunan capaian prestasi dari tahun sebelumnya berada di urutan pertama di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, namun hal ini tidak menjadi suatu kegagalan prestasi karena jika dibandingkan capaian di tahun sebelumnya maka capaian tahun ini masih lebih baik karena adanya peningkatan nilai SBPE dari 2,75 menjadi 3,11.

Tabel 3.6 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

Tahun 2022

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Banjar	2,56	Cukup
2	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tapin	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
5	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabalong	2,00	Cukup
7	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Balangan	2,44	Cukup
10	Pemerintah Kota Banjarmasin	3,31	Baik
11	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,26	Cukup

### a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). SPBE merupakan suatu sistem untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Hasil evaluasi SPBE Tahun 2022 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebesar 3,11 yang berarti telah melebihi nilai target yang ditetapkan yakni sebesar 2,75, dengan realisasi mencapai 113,09%. Nilai indeks 3,11 masuk dalam predikat baik (2,6–3,5). Tabel berikut memperlihatkan kategori nilai SPBE.

Tabel 3.7 Kategori SPBE

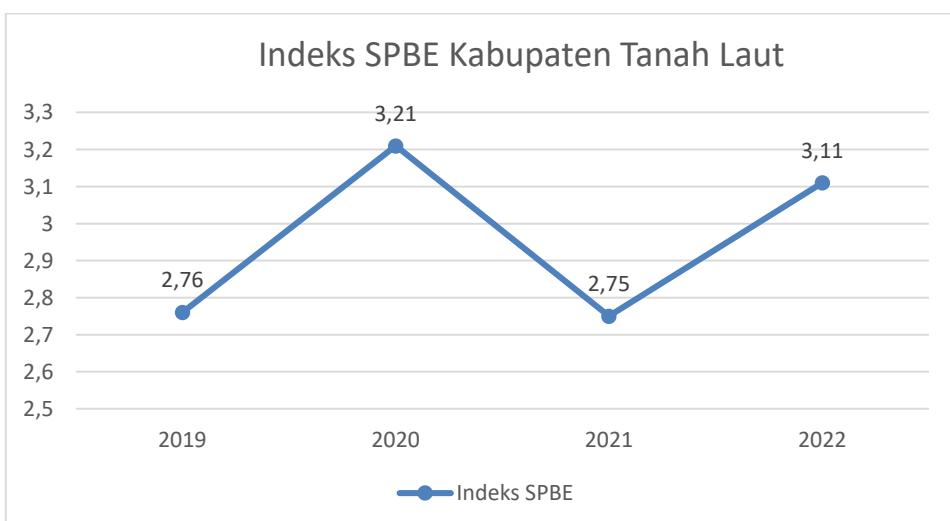
NO	NILAI SPBE	PRIDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – <4,2	Sangat Baik
3	2,6 – <3,5	Baik
4	1,8 – <2,6	Cukup

Pada Tahun 2022 penilaian SPBE didasarkan atas domain dan aspek penilaian, yang dirincikan sebagai tabel berikut:

Tabel 3.8 Domain dan Aspek Penilaian

NO	DOMAIN	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	Kebijakan SPBE	- Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
2	Tata Kelola SPBE	- Perencanaan Strategis SPBE	10%
		- Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
		- Penyelenggara SPBE	5%
3	Manajemen SPBE	- Penerapan Manajemen SPBE	12%
		- Audit TIK	4,5%
4	Layanan SPBE	- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
		- Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

b. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait



Indeks SPBE tahun 2022 adalah 3,11 meningkat sebesar 0,36 dari Indeks SPBE tahun 2021 dengan nilai 2,75, sedang pada

tahun 2020 adalah 3,21 dan tahun 2019 adalah 2.76 sedangkan pada awal penilaian tahun 2018 adalah 1,42, artinya indeks SPBE telah mengalami peningkatan atau semakin baik per tahunnya. Peningkatan tersebut cukup signifikan dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2022 nilai SPBE kembali naik dari tahun sebelumnya (tahun 2021) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori baik, penurunan nilai disebabkan bertambahnya indikator penilaian SPBE dari 35 indikator menjadi 47 indikator penilaian. Nilai SPBE yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 3,11 ini jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar 2,8 maka nilai yang diperoleh telah melebihi target sebesar 0,31 atau capaian dalam persen sebesar 111,07%, yang artinya telah tercapai sesuai target akhir Renstra. Nilai yang diperoleh tahun ini masih dapat ditingkatkan untuk penilaian indeks SPBE di tahun ke depannya.

Hasil perolehan indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sebesar 3,11 jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE nasional tahun 2022 yakni sebesar 2,34, maka capaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut telah melebihi capaian indeks SPBE nasional.

Dari evaluasi penilaian SPBE ini, seluruh pimpinan dan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diinstruksikan agar meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

#### c. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan nilai 3,11 bila dibandingkan dengan Indeks SPBE Tahun 2021 dengan Nilai 2,75 mengalami kenaikan sebesar 0,31. Peningkatan

nilai tersebut diupayakan dalam rangka mempertahankan nilai SPBE yang diperoleh tahun sebelumnya dan menambah pemenuhan beberapa indikator penilaian, namun demikian meskipun dengan perolehan nilai 3,11, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih memperoleh predikat baik yang merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi seluruh unit-unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaan SPBE. Berbagai upaya yang dilakukan dengan membentuk Tim Evaluasi Internal Penilaian Mandiri SPBE di Kabupaten Tanah Laut, menyusun aktualisasi pelaksanaan SPBE, menentukan target indikator untuk dipenuhi, menyusun rencana aksi dan tindak lanjut sosialisasi, melakukan kegiatan teknis penunjang SPBE seperti integrasi berbagai aplikasi, penyediaan/fasilitasi sarana/prasarana komunikasi dan informasi, peningkatan layanan publik, peningkatan SDM aparatur, serta pemantapan dalam pelaksanaan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Hal yang paling penting tercapainya target dan peningkatan SPBE adalah komitmen pimpinan (Bupati) yang sangat tinggi, sehingga memacu SKPD lain untuk lebih serius dan aktif mengimplementasikan SPBE. Akhirnya koordinasi dan kerja sama dapat terjalin dengan baik antar SKPD.

Selanjutnya untuk dapat lebih meningkatkan SPBE di tahun mendatang, beberapa hal rekomendasi di bawah ini agar dapat dilakukan, yaitu: perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar OPD dan dengan provinsi dan pusat, perlunya pengembangan pusat data dan peletakan server semua OPD di pusat data dan SOP pemanfaatan pusat data oleh semua OPD, perlunya pembuatan dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang lengkap dan mencakup semua OPD.

#### d. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 telah terlaksana 100% secara keseluruhan pada kinerja fisik dengan capaian penggunaan anggaran sebesar Rp 9.517.772.688,- dari pagu anggaran sebesar Rp 10.474.476.919,- dengan persentase capaian 90,87 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 956.704.231,- atau 9,13 %.

#### e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sebanyak 19 orang PNS, terdiri dari Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 0 orang (tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas Sekretaris), Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Pejabat Pangawas) sebanyak 4 orang, staf pelaksana sebanyak 11 orang. Selain itu dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya juga dibantu oleh tenaga kontrak/pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 23 orang.

### 3. Eselon III (Sekretaris)

Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan target dan realisasi indikator kinerja Sekretaris tahun 2022.

Tabel 3.9 Hasil capaian realisasi sasaran Sekretaris

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.3 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	3.4 Meningkatnya implementasi RB	Nilai RB SKPD	84 nilai	90,11 nilai	107,27%	86 nilai	104,78%

dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	81 nilai	76,84 nilai	94,81%	82 nilai	93,71%
Rata-Rata Capaian				100,69 %		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai RB SKPD	-	84,05 nilai	84 nilai	90,11 nilai	107,27%
	Nilai SAKIP SKPD	72,58 nilai	77,85 nilai	81 nilai	76,84 nilai	94,81%
	Rata-rata Capaian					100,69%

#### f. Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat telah terealisasi 100,69%. Dari 3 indikator kinerja, indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka telah tercapai 100% sesuai dengan target. Untuk indikator nilai RB (Reformasi Birokrasi) tercapai nilai 90,11 yang jika dibandingkan dengan target nilai 84, maka diperoleh persentase capaian 107,27% sedang nilai SAKIP SKPD hanya tercapai dengan nilai 76,84 dari target tahun 2022 nilai 81, yang disebabkan masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga persentase capaian nilai SAKIP SKPD adalah 94,81 %. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan target

akhir Renstra maka masih kurang 5,16 yang artinya proses pelaksanaan SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut masih harus ditingkatkan kembali agar target akhir Renstra dapat tercapai.

*g. Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2021 yang terdiri dari indikator persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu telah tercapai 100% pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 realisasinya juga tercapai 100%. Indikator persentase indikator nilai RB SKPD diperoleh dengan nilai 90,11 dengan kategori sangat baik dari target nilai sebesar 84 dengan persentase capaian 107,27%, sedang nilai SAKIP SKPD juga telah terealisasi dengan nilai 76,84 dengan target nilai 81 sehingga persentase tercapaiannya adalah 94,81%.

*h. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu**

Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 telah mencapai 100% dari target yang ada yaitu sebanyak 65 berkas yang terdiri atas 29 berkas urusan umum dan 36 berkas urusan kepegawaian. Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

### - **Nilai RB SKPD**

Nilai RB SKPD di tahun 2021 yang dievaluasi tahun 2022 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Tanah Laut diperoleh nilai 90,11 dari target 84. Hasil penilaian terhadap Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menunjukkan berada pada nilai 32,71 **(90,11)**, kategori Sangat Baik. Nilai ini merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen pengungkit yang terdiri dari 8 (delapan) area pemenuhan dan 8 (delapan) area reform.

Pelaksanaan PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dimulai pada bulan Januari 2022. Pada tahapan ini telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Rapat koordinasi dengan SKPD terkait, dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Instrumen dari Kementerian PANRB;
2. Penilaian *offline* dan *online* melalui aplikasi *SIKREBO*. Pada tahapan ini asesor bersama dengan tim pelaksana SKPD melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi RB yang merupakan format dari Kementerian PAN dan RB.
3. Reviu LKE RB. Tahapan ini dilaksanakan bersamaan dengan finalisasi evaluasi pelaksanaan RB. Pada tahapan ini Lembar Kerja Evaluasi RB yang telah diisi dilakukan reviu oleh tim Inspektorat. Reviu ini untuk melihat kesesuaian antara data dukung dengan hasil penilaian RB yang dilakukan.
4. Penilaian *online*. Pada tahapan ini hasil penilaian *offline* yang telah dilakukan oleh Tim Assesor PMPRB diinput ke dalam aplikasi *online* PMPRB Kementerian PAN dan RB.

5. Pengiriman Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB kepada Kementerian PANRB dengan melakukan *SUBMIT* melalui aplikasi PMPRB *online*. Pada tahapan ini diharapkan seluruh hasil penilaian yang telah diinput ke dalam aplikasi *online* dikirim akan dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menilai implementasi RB SKPD dan kesesuaian data dukungnya.

Dari hasil Pelaksanaan PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Laut sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat diperoleh nilai sebagai berikut :

Nomor	Komponen/Sub Komponen	Hasil Penilaian	
		Nilai	%
A	<b>PEMENUHAN (14,60)</b>	<b>12,74</b>	<b>87,26</b>
B	<b>REFORM (21,70)</b>	<b>19,97</b>	<b>92,03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32,71</b>	<b>90,11</b>

### 1. Komponen Pemenuhan

Komponen Pemenuhan dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Assesor. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Delapan area perubahan yang dinilai tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajamen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

#### a. Manajemen Perubahan (2%)

Penilaian manajemen perubahan dalam melakukan reformasi internal diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu Tim Reformasi Birokrasi, Road Map RB, Pemantauan dan

Evaluasi, serta Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,80 (90%).

b. Deregulasi Kebijakan (1%)

Penilaian untuk area perubahan Deregulasi Kebijakan dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Harmonisasi. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,00 (100%).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi (2%)

Penataan dan penguatan dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu evaluasi Kelembagaan dan Tindak Lanjut Evaluasi. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,00 (50%).

d. Penataan Tata Laksana (1%)

Penataan Tata Laksana memiliki 2 (dua) indikator yaitu Proses Bisnis dan Prosedur Operasional tetap (SOP) dan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 0,73 (73%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM (1,40%)

Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki 6 (enam) indikator antara lain Perencanaan kebutuhan pegawai, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem Informasi Kepegawaian. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,33 (95%).

f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%)

Penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas meliputi 2 (dua) indikator antara lain Keterlibatan pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 2,25 (90%).

g. Penguatan Pengawasan (2,2%)

Penilaian pada area Penguatan Pengawasan meliputi 6 (enam) indikator antara lain Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle-Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 1,62 (74%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)

Penilaian pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 5 (lima) indikator antara lain Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,87 (75%).

## 2. Komponen Reform

Komponen Reform dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Assesor. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Delapan area perubahan yang dinilai tersebut adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Manajemen Perubahan (3%)

Penilaian manajemen perubahan dalam area reform diukur dari 3 (tiga) indikator, yaitu Komitmen dalam Perubahan, Komitmen Pimpinan, serta Membangun Budaya Kerja. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 3,00 (100%).

b. Deregulasi Kebijakan (2%)

Penilaian untuk area Deregulasi Kebijakan pada reform dilihat dari indikator Peran Kebijakan. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 2,00 (100%).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5%)

Penilaian untuk area Penataan dan Penguatan Organisasi pada reform dilihat dari indikator Organisasi Berbasis Kinerja. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 0,00 (0%).

d. Penataan Tata Laksana (3,75%)

Penataan Tata Laksana memiliki 3 (tiga) indikator yaitu Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi, dan Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat. Hasil Penilaian Mandiri pada area ini sebesar 3,42 (91%).

e. Penataan Sistem Manajemen SDM (2%)

Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki 3 (tiga) indikator antara lain Kinerja individu, *Assessment* Pegawai dan Pelanggaran Disiplin Pegawai. Hasil Penilaian Mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,50 (75%).

f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%)

Penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas meliputi 4 (empat) indikator antara lain Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja, Pemberian *Reward and Punishment* dan Kerangka Logis Kinerja. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 3,30 (88%).

g. Penguatan Pengawasan (1,95%)

Penilaian pada area Penguatan Pengawasan meliputi 3 (tiga) indikator antara lain Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 1,95 (100%).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)

Penilaian pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 5 (lima) indikator antara lain Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi. Hasil penilaian mandiri pada area perubahan ini sebesar 3,75 (100%).

Rencana tindak lanjut disusun setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB *unevaluated*). Rencana tindak lanjut tersebut menjadi komitmen manajemen organisasi sebagai penanggungjawab area perubahan untuk menjamin perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan SKPD guna mendukung Pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode berikutnya.

- **Nilai SAKIP SKPD**

Nilai SAKIP SKPD di tahun 2021 yang dievaluasi tahun 2022 hasil evaluasi dari Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh nilai 76,84 (kategori BB) dari target nilai yang ada 81 dengan persentase capaian 94,81%. Dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya memang terjadi penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai sebesar 76,84 dengan kategori BB (sangat Baik), akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Nilai sebagai mana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari

seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Diperoleh nilai sebesar 24 (hasil evaluasi dari yang dharapkan sebesar 30% dengan kategori **BB (sangat baik)**).

b. Pengukuran kinerja

Diperoleh nilai sebesar 23,01 (hasil evaluasi dari yang dharapkan sebesar 30% dengan kategori **BB (sangat baik)**).

c. Pelaporan kinerja

Diperoleh nilai sebesar 11,51 (hasil evaluasi dari yang dharapkan sebesar 15% dengan kategori **BB (sangat baik)**).

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Diperoleh nilai sebesar 18,33 (hasil evaluasi dari yang dharapkan sebesar 25% dengan kategori **BB (sangat baik)**).

Dari hasil evaluasi direkomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1. Agar seluruh dokumen perencanaan yang direvisi diformalkan, didokumentasikan dan diarsipkan, baik dokumen sebelum dan sesudah perubahan;

2. Indikator pada sasaran kinerja Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) agar benar-benar memenuhi kriteria SMART;

3. Indikator kinerja pada PK Pejabat Eselon IV agar benar-benar mendukung tercapainya indikator kinerja Pejabat Eselon III.

b. Pengukuran Kinerja

Perlunya laporan atas hasil pengukuran kinerja dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment

sehingga seluruh pegawai memahami atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Agar seluruh pejabat berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Agar hasil Evaluasi AKIP internal dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

i. *Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD telah memakai aplikasi SIPD dan emonev.
2. Pengelolaan administrasi keuangan SKPD telah memakai sistem transaksi non tunai atau melalui Internet Banking Bisnis (IBB).
3. Pengelolaan administrasi umum SKPD.
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.
5. Pemeliharaan barang milik daerah telah dilaksanakan secara rutin.

j. *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.292.442.693,- dari pagu program Rp 5.000.965.788,- dengan persentase capaian 85,83 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 708.523.095,-.

k. *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sebanyak 7 orang PNS yang terdiri dari Kepala Dinas, Plt. Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag

Perencanaan dan Keuangan, dan 3 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 6 orang tenaga kontrak (PTT). Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.
- Adanya gedung baru yang representatif sangat mendukung dalam kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai Dinas Kominfo.

#### *I. Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran program untuk sekretariat Dinas Kominfo sebagian besar ditargetkan pada awal triwulan I sampai dengan triwulan II karena merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- Rencana aksi kinerja untuk sekretariat Dinas Kominfo juga sebagian besar ditargetkan di awal triwulan I dan II menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

#### *m. Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya:

- Kurangnya SDM personil yang ada pada Sekretariat Dinas Kominfo

- Belum optimalnya monitoring program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja.
- Kurangnya data dukung administratif atau dokumentasi program kegiatan yang dilaksanakan sehingga cukup menghambat dalam penyusunan laporan akhir.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan atau diklat terkait.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala per triwulan
- Melakukan pengumpulan data dukung secara intensif sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan akhir.
- Mengupayakan peningkatan layanan melalui media informasi maupun sarana prasarana yang dimiliki kepada SKPD Lingkup Pemerintah Tanah Laut dan masyarakat umum.

#### 4. Eselon III (Kepala Bidang)

##### 4.1 Kepala Bidang Komunikasi

Tabel 3.11 Hasil capaian realisasi sasaran Kepala Bidang Komunikasi Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	1.1 Meningkatnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Percentase informasi yang disebarluaskan	100%	100%	100%	100%	100%
2	1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Percentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	100%	100%	108%
Rata-Rata Capaian				100%			

Capaian realisasi sasaran kinerja bidang komunikasi dengan indikator persentase informasi yang disebarluaskan telah tercapai 100% sesuai dengan target tahun 2022, sedangkan untuk indikator Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) telah tercapai 27 % sesuai dengan target indikator yang ditetapkan tahun 2022, sedangkan untuk perbandingan dengan capaian akhir Renstra maka pada indikator KIM dihitung dengan mengakumulasikan capaian KIM pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sehingga diperoleh akumulasi capaian KIM sebesar 108% dari 100% target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase informasi yang disebarluaskan	118,93%	97,33%	100%	100%	100%
2.	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27%	27%	27%	27%	100%
		Rata-rata Capaian				
						100%

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang pengelolaan komunikasi adalah 100% dari 2 indikator kinerja, capaian indikator persentase informasi yang disebarluaskan pada tahun 2022 telah tercapai 100% yang sebelumnya hanya tercapai 97,33% dari target 100% tahun 2021, dan indikator lainnya juga telah tercapai 27% dari target tahun 2022 (27%) sehingga pencapaiannya adalah 100%. Persentase informasi yang disebarluaskan pada tahun 2022 sebesar 100% yang jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 100%, maka kinerjanya telah tercapai sesuai target akhir. Sedang pada persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi

informasi juga telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2021 yang terdiri dari indikator persentase informasi yang telah disebarluaskan telah tercapai 100% sesuai target pada tahun 2022 sedang pada tahun 2021 capaian kurang dari target 100% yakni 97,33%. Sedangkan pada indikator Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi juga telah terealisasi 27% dengan target 27% sehingga tercapai 100%.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase Informasi yang Disebarluaskan**

Persentase informasi yang disebarluaskan oleh Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 dicapai angka 100% dari target. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah informasi yang disebarluaskan sebanyak 1.300 data/informasi dibagi data informasi yang harus disebarluaskan sebanyak 1.300 data/informasi target dalam setahun pelaksanaan kegiatan. Capaian 488 data/informasi tersebut terdiri atas Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui website Tanah Laut sebanyak 488 informasi dan Jumlah data/informasi publik melalui website PPID Kabupaten Tanah Laut sebanyak 300 informasi dan melalui radio Tuntung Pandang FM sebanyak 512 informasi. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi tersebut selain melalui website Tanah Laut dan PPID Tanah Laut juga disebarluaskan melalui media lainnya seperti Radio Tuntung Pandang FM, media cetak dan media sosial serta melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam pengelolaan informasi, yang semuanya telah dilaksanakan pada

tahun berkenaan, namun dalam hal penyebaran informasi tersebut harus dilakukan melalui proses analisa dan identifikasi serta klasifikasi atas data/informasi yang akan disebarluaskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terlebih dahulu berdasarkan ketentuan pada layanan informasi publik, dengan tujuan menjaga kebenaran dan akurasi data/informasi tersebut. Seluruh pencapaian atas target indikator ini dapat tercapai atas hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung terlaksananya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.

- **Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi**

Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi telah diperoleh realisasi 27 % sesuai dengan target tahun 2022 sehingga persentase capaiannya 100%. Persentase capaian KIM ini dihitung dari jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dan dibina pada tahun 2022 yakni sebanyak 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibagi 11 kecamatan dikali 100% sehingga diperoleh 27%. Capaian tersebut jika dibagi dengan target pada tahun 2022 sebesar 27 % maka target telah tercapai 100%. Pada tahun 2021 pun ini juga diperoleh capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi yakni masih adanya wilayah yang tidak memiliki jaringan internet yang baik atau wilayahnya tidak terjangkau internet sehingga terkendala saat mempublikasikan informasi melalui media website ataupun media sosial lainnya. Untuk selanjutnya Pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ini terus dilakukan pembenahan dan peningkatan dalam bentuk desa informatik dengan menjalin koordinasi dengan Kepala Desa dan

Camat serta masyarakat untuk turut mendukung program Kota ditata Desa dibina.

Gambar koordinasi dengan desa terkait rencana pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)



*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) melalui website [ppid.tanahlautkb.go.id](http://ppid.tanahlautkb.go.id) dimana Diskominfo Tanah Laut sebagai PPID utama yang mengkoordinir PPID Pembantu pada setiap

badan publik (satuan kerja) dilingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut

2. Melakukan monitoring berkala setiap trimester terhadap informasi yang telah dipublikasikan melalui website [ppid.tanahlautkab.go.id](http://ppid.tanahlautkab.go.id)
3. Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media radio tuntung pandang dengan program Siaran Info Tala, Tanah Laut Menyapa dan Ruang Inspirasi dengan menghadirkan narasumber dari instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun instansi vertikal dan narasumber inspiratif.
4. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui pelatihan pembuatan media publikasi berupa blogspot, dan pelatihan tata cara penulisan berita dan pengambilan foto untuk konten publikasi.
5. Penyebarluasan informasi melalui media sosial fanpage Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, portal website Tanah Laut di alamat website resmi pemerintah kabupaten tanah laut [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id), media sosial instagram, facebook, youtube serta website [tpfm.tanahlautkab.go.id](http://tpfm.tanahlautkab.go.id).
6. Pro-Aktif dalam penyebarluaskan informasi valid dan cegah isu hoax virus corona melalui media pemerintah daerah.
7. Pengelolaan aplikasi e-lapor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Melakukan rapat koordinasi setiap tahun anggaran dengan seluruh PPID Pembantu dan Pejabat Penghubung LAPOR yang dijabat oleh Sekretaris pada masing masing SKPD dalam rangka evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik dan penanganan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR).
9. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Komunikasi telah terlaksana secara keseluruhan pada satu buah program, yaitu program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.290.440.245,- dari pagu program Rp 2.420.881.290,- dengan persentase capaian 94,61 %, terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 130.441.045,-.

*f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Komunikasi tahun 2022 sebanyak 3 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Komunikasi, 1 orang sub koordinator kegiatan dan 1 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 9 orang tenaga kontrak (PTT) yang terdiri dari 3 orang jurnalis, 5 tenaga penyiar dan 1 orang tenaga administrasi. Keberhasilan capaian program pada Bidang Komunikasi didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dikelola cukup baik oleh sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Pengelolaan website e-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang sudah cukup baik oleh tim Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan kerjasama dengan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, instansi vertikal Pemerintah maupun Tokoh Masyarakat sebagai narasumber untuk mengisi program forum konsultasi publik melalui siaran radio.
- Peningkatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

- Peningkatan SDM pada bidang komunikasi dalam pengelolaan informasi melalui media sosial dan media online lainnya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di bidang Komunikasi yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.
- Meningkatkan kapasitas-kapasitas personil lapangan dalam melakukan peliputan lapangan.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Bidang Komunikasi dengan program pengelolaan komunikasi dan informasi publik disusun dengan target penggunaan anggaran pada triwulan I 46%, Triwulan II 7%, triwulan III 1% dan triwulan IV 46%.
- Rencana aksi kinerja pada Bidang Komunikasi dengan target kinerja persentase informasi yang disebarluaskan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yakni triwulan I 40%, Triwulan II 10%, triwulan III 10% dan triwulan IV 40%.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Komunikasi, diantaranya:

- Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan.
- Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal.
- Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik.
- Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum maksimal.
- Belum tersedianya anggaran khusus untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam menjalankan kegiatan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis jurnalis dan tenaga teknologi informatika pada bidang komunikasi.
- Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Infomasi publik.
- Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website:
  - 1.<http://ppid.tanahlautkab.go.id>
  - 2.<http://portal.tanahlautkab.go.id>
- Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD untuk menyampaikan materi terkait penggunaan APBDes untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kab. Tanah Laut.

#### **4.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government**

Tabel 3.13 Hasil capaian realisasi sasaran Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	3.1 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Percentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %	10%	112,36%	100%	114,7%
2	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Percentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%	100%
3	2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Percentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%	

Rata-Rata Capaian	104,12%		
-------------------	---------	--	--

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	17,8%	22,5%	8,9%	10%	112,36%
2.	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata Capaian					104,12%

a) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

Rata-rata Capaian Kinerja bidang penyelenggaraan e-government telah terealisasi 104,12%. Pada indikator kinerja persentase SKPD yang menerapkan SPBE hanya tercapai 10% dari target tahun 2022 sebesar 8,9% sehingga persentase capaiannya menjadi 112,36 % atau melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id dengan target 100% telah tercapai 100%, dan pada indikator kinerja persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi juga telah tercapai 100% dengan target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka nilai persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang telah tercapai 114,7%, yang merupakan akumulasi persentase capaian target kinerja dari kondisi awal Renstra sampai dengan capaian tahun 2022. Meskipun target telah tercapai 100% sesuai renstra namun kebutuhan akan teknologi dapat terus meningkat sesuai perkembangan yang semakin canggih dan modern sehingga kinerja

dari bidang penyelenggaraan e-government harus dapat menyesuaikan. Sedang pada indikator persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id dan persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga kedepannya harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2022 dengan 2021 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang menerapkan SPBE telah tercapai 10% pada tahun 2022 sedangkan capaian pada tahun 2021 tercapai 22,5%, terjadi penurunan capaian yang sebesar 12,5% dibandingkan realisasi tahun 2021, hal ini disebabkan adanya penurunan target kinerja pada tahun 2022 yang hanya ditargetkan 8,9% sesuai dengan target tahunan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pada indikator Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id telah terealisasi 100% dengan target 100% sehingga tercapai 100% seperti halnya pada tahun 2021. Pada indikator kinerja Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi telah tercapai 100% dengan target 100% pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 juga telah tercapai 100%.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE**

Persentase SKPD yang menerapkan SPBE yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 telah tercapai 10% dari target 8,9% dengan persentase capaian 112,36% dibandingkan tahun 2021 yang

tercapai 22,5 % dari target 50% dengan persentase capaian 45% dari target yang ada. Data tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah SKPD yang menerapkan e-government sebanyak 4 SKPD dibagi jumlah SKPD yang ada (berjumlah 40), sehingga diperoleh persentase capaian 10%. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan empat SKPD dalam penerapan SPBE dalam pelayanannya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Penerapan SPBE baru mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2018 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal. Pada tahun 2019 dan 2020 mulai meningkat, proses pencapaian tersebut didukung dengan baik oleh Kepala Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga SKPD dapat meningkatkan pemahaman tentang perlunya Penerapan SPBE. Keberhasilan capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dari seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut guna menukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah guna menghadapi era digital yang terus berkembang. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah penataan infrastruktur TIK dan belum terhubungnya jaringan antar SKPD untuk 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPBE tersebut dalam bentuk konsultasi/koordinasi, fasilitasi dan juga pemberian rekomendasi pembuatan jaringan dan perangkat yang diperlukan oleh SKPD dalam penerapan SPBE. Untuk kedepannya perlu diadakan

sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE tersebut serta melakukan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.

- **Persentase Penggunaan Domain tanahlautkab.go.id**

Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 telah tercapai 100% dari target 100% dengan persentase capaian 100% dibandingkan tahun 2021 yang juga telah tercapai 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100%.

- **Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi**

Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 telah mencapai 100% dari target yang ada. Persentase capaian dihitung dari jumlah SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dibagi jumlah permohonan SKPD dikali 100%. Ada dua belas SKPD yang memohon fasilitasi dan dari semua permohonan tersebut telah diproses sesuai permohonan yaitu dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Pembuatan Aplikasi E-SAKIP dan Aplikasi Siperjaka); Kecamatan Pelaihari (Permohonan Hosting Dan Sub Domain); Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Permohonan Fasilitasi Pembuatan Website SKPD); Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut (Permohonan Fasilitasi Data dan Aplikasi); Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Permohonan pembuatan aplikasi); Kecamatan Panyipatan (Permohonan Fasilitasi Pembuatan Website Desa

dan Fasilitasi hosting dan domain aplikasi Sapadescam); Dinas Kesehatan (Permohonan Pembuatan Aplikasi untuk inovasi); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Fasilitasi infrastruktur untuk pemanfaatan data kependudukan); Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Layanan Cloud SIMDA BMD); Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Permohonan Pembuatan Aplikasi perizinan DPMPTSP); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permohonan Layanan Virtual Server); dan Badan Pedapatan Daerah (Permohonan pendampingan penambahan fitur baru pada website Bapenda). Proses fasilitasi dilakukan melalui surat permohonan dari SKPD yang bersangkutan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian didisposisi oleh Kepala Dinas kepada Bidang Penyelenggaraan *E-Government* untuk diproses dan ditindaklanjuti. Strategi kedepannya ialah perlunya menyediakan layanan terpadu satu pintu pada setiap surat permohonan yang masuk kepada Dinas melalui online dan menyiapkan penjadwalan petugas informasi guna pelayanan e-government yang lebih baik.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Penyediaan layanan internet dan layanan data terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
2. Penyediaan layanan-layanan terkait teknologi dan informasi bagi seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya pengembangan aplikasi, jaringan, integrasi data, layanan *hosting*, *colocation server* dan digitalisasi.
3. Peningkatan peralatan penunjang kerja bagi aparatur guna pengoptimalan kinerja.
4. Kerjasama Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam peningkatan e-government.

5. Penyediaan fasilitas video conference bagi pimpinan dan SKPD di Lingkup Kabupaten Tanah Laut.
6. Pengelolaan jaringan fiber optik dan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pembuatan aplikasi penunjang SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
8. Peningkatan SDM aparatur dengan mengadakan diklat intern urusan teknologi informasi.
9. Pengelolaan *Network Operation Center* (NOC) beserta fasilitas penunjangnya.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyelenggaraan *E-Government* hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program aplikasi informatika dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.787.251.000,- dari pagu program Rp 2.952.853.600,- dengan persentase capaian 96,52 %. Terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 102.627.600,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Penyelenggaraan *E-Government* tahun 2022 sebanyak 6 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Penyelenggaraan *E-Government*, 1 orang sub koordinator kegiatan dan 4 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 4 orang tenaga kontrak (PTT) yang terdiri dari 2 orang tenaga pengelola aplikasi, 1 tenaga pengelola jaringan dan 1 orang tenaga administrasi. Keberhasilan capaian program pada Bidang Penyelenggaraan *e-government* didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pelaksanaan pemenuhan indikator penunjang penilaian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang telah dikelola

dengan cukup baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- Dukungan langsung dari Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas dalam memberikan arahan dan masukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Tanah Laut.
- Peningkatan SDM pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* dalam pengelolaan sistem jaringan dan aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Kerjasama yang baik dari Tim Pengembangan Teknologi Informasi dan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan *e-government*.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* pada program Aplikasi Informatika sebagian besar disusun pada triwulan I 92% dan triwulan IV 8%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Penyelenggaraan *E-Government* pada program Aplikasi Informatika dengan target kinerja Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 90% dan triwulan IV 10% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, diantaranya:

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi pada *Network Operation Center (NOC)*.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta aplikasi.

- Belum optimalnya pemanfaatan jaringan fiber optik penghubung antar SKPD guna mendukung program smart city di Kabupaten Tanah Laut.
- belum adanya dana untuk pengisian ruang Command Center, sehingga command center belum dapat difungsikan.
- Adanya kondisi blankspot internet di beberapa titik.
- Semakin banyaknya permintaan pembuatan aplikasi dan kurangnya tenaga ahli berkemampuan khusus pada bidang Penyelenggaraan e-government.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Peningkatan SDM kepegawaian melalui pelatihan atau diklat terkait pengelolaan Teknologi Informasi.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE dan koordinasi secara langsung terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi dalam indikator SPBE.
- Dinas Kominfo telah membangun jaringan fiber optik antar SKPD yang telah menghubungkan internet pada 30 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tersedianya jaringan intranet dan internet tpusat pada Dinas Kominfo guna mendukung terselenggaranya SPBE dengan baik di Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait penyediaan layanan internet menggunakan jaringan lastmile.
- Merencanakan terlaksananya koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut dan berpotensi dapat membantu pembiayaan untuk pengisian perangkat Command Center.

### 4.3 Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Tabel 3.15 Hasil capaian realisasi sasaran Kepala Bidang Statistik dan Persandian Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTA SE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTR A	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	20%	22,5%	112,5%	100%	29,7%
2	Meningkatnya kualitas data sektoral daerah	Persentase statistik sektoral daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian				106,25%			

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik	2,4%	2,4%	20%	22,5%	112,5%
2.	Persentase statistik sektoral daerah	80%	80%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					106,25%	

#### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja bidang Statistik dan Persandian telah terealisasi 106,25%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik telah tercapai 22,5 % dengan target

20% tahun 2022 sehingga persentase capaiannya 112,5%. Untuk indikator lainnya juga telah tercapai 100% dari target tahun 2022 (100%), sehingga persentase capaiannya 100%. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang diperoleh tahun 2022 sebesar 22,5%, jika dibandingkan target akhir Renstra 100% maka indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik diakumulasikan dari capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sehingga diperoleh capaian 29,7%, yang artinya masih terdapat selisih 70,3% dari target Renstra akhir. Untuk ke depannya target dan capaian indikator ini harus ditingkatkan kinerjanya karena target akhir renstra masih belum tercapai. Sedangkan pada persentase statistik sektoral tahun 2022 telah tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2021 yang terdiri dari indikator persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik telah tercapai 22,5% pada tahun 2022 dengan target 20% sehingga persentase capaiannya 112,5% sedangkan pada tahun 2021 kegiatan ini hanya tercapai 2,4% dengan target 50% sehingga persentase capaiannya hanya 4,8%. Untuk indikator Persentase statistik sektoral telah terealisasi 80% dengan target 80% sehingga tercapai 100% sesuai target.

*c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik**

Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) dan tanda tangan elektronik yang dilaksanakan oleh

Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 telah tercapai 22,5%, terjadi peningkatan capaian dari tahun 2021 yang hanya mencapai 2,4% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Hal ini disebabkan pemanfaatan persandian baru dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga hasil yang diperoleh pada tahun tersebut masih belum maksimal sedang pada tahun 2020 terkait tanda tangan elektronik sudah dalam tahapan pengusulan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Kemudian di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah mengupayakan tanda tangan elektronik ini agar dapat diterapkan dan diujicobakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan dukungan dari Kepala Daerah serta kerja sama yang solid antar SKPD agar dapat tercapai dengan baik guna menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi persandian/keamanan informasi diterapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen/informasi/data elektronik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah transformasi persandian yang semula hanya mengurusi keamanan informasi rahasia (santel) menjadi kegiatan keamanan informasi secara keseluruhan belum tersosialisasikan dengan baik. Pengamanan informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat, sehingga sumber daya yang ada dapat menyesuaikan dengan isu-isu teknologi terkini. Strategi kedepan ialah perlunya penambahan personil bidang keamanan informasi dan keamanan siber, maupun adanya pelatihan/bimbingan teknis/koordinasi tentang keamanan informasi dengan instansi-instansi terkait.

**- Persentase statistik sektoral daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian dalam pencapaian Persentase statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 telah mencapai 100% dari target yang ada dengan persentase capaian 100%. Semua SKPD telah melakukan input indikator data pada aplikasi Satu Data Tanah Laut sehingga target telah tercapai 100 %. Kedepannya Aplikasi Satu Data perlu dikembangkan/update sistem untuk dapat lebih banyak melakukan input data terhadap indikator-indikator yang harus terisi datanya serta menyesuaikan dengan kebutuhan data daerah dalam rangka mendukung terwujudnya SATU DATA INDONESIA. Kendala dalam pelaksanaannya ialah setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data. Langkah kedepan perlu pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut untuk menunjang kegiatan penyusunan buku ikhtisar statistik sektoral daerah yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Focus Group Discussion (FGD) dalam pengelolaan data statistik.
2. Sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
3. Pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data.
4. Pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
5. Koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut.
7. Berkoordinasi dengan kantor BPS Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun metadata.
8. Bersama Bappeda Kabupaten Tanah Laut membentuk forum satu data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.370.000,- dari pagu program Rp 49.805.090,- dengan persentase capaian 95,11% dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.435.090,- sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 37.293.750,- dari pagu program Rp 49.971.151,- dengan persentase capaian 74,63 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 12.677.401,-.

f) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian tahun 2022 sebanyak 3 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kabid Statistik dan Persandian, 1 orang Kasi Pengelolaan Statistik, dan 1 orang Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan telekomunikasi. Tenaga pendukung staf pelaksana dilaksanakan oleh 1 orang tenaga kontrak. Meskipun demikian, bidang Statistik dan Persandian masih dapat memperoleh pencapaian yang cukup baik. Keberhasilan capaian program pada Bidang Statistik dan Persandian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Koordinasi intensif antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pengisian indikator statistik sektoral melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut.
- Tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
- Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bappeda terkait upaya pembentukan tim Satu Data Tanah Laut.

*g) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada bidang Statistik dan Persandian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral disusun pada Triwulan I 12%, triwulan II 52% dan triwulan III 36% sedangkan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi disusun pada Triwulan I 100%.
- Rencana aksi kinerja pada bidang Statistik dan Persandian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target kinerja Persentase Statistik sektoral daerah sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 10%, triwulan II 70% dan triwulan IV 20% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sedangkan pada program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 100% sesuai dengan ketersediaan anggaran.

*h) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Bidang Persandian dan Statistik, diantaranya:

- Kurangnya personil yang ada pada Bidang Statistik dan Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.
- Penerapan modul TTE BSrE dan persiapan server *development/production* untuk uji coba.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
- Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.
- Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
- Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
- Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara

berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

- Telah dilaksanakan uji coba/uji kesesuaian dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

## 5. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)

### 5.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTA SE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHAD AP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	65 berkas	99 berkas	152,31 %	65 berkas	152,31%
		Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	0 orang	0%	10 orang	20%
		Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area	8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					117,44 %		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi	67 berkas	65 berkas	65 berkas	99 berkas	152,31 %
2.	Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	2 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%

3.	Jumlah laporan pengelolaan aset daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %
4.	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %
	Rata-rata Capaian					117,44 %

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2022 sebesar 117,44%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 4 indikator. Pada indikator jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas tercapai 99 berkas yang terdiri atas 66 berkas urusan umum dan 33 berkas urusan kepegawaian. Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 0 orang dengan hasil 0 orang karena adanya penundaan pelaksanaan diklat yang anggarannya dilakukan pergeseran untuk kegiatan yang lain. Indikator jumlah laporan pengelolaan aset daerah dengan target 2 laporan yaitu laporan pengelolaan belanja modal dan laporan pengelolaan barang habis pakai telah tercapai 100%. Indikator jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area telah tercapai seluruh area perubahan pada 8 dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi. Untuk indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal ini jika dibandingkan dengan Renstra akhir maka hanya diperoleh capaian 20% perhitungan akumulasi dari capaian target dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Sedangkan indikator lainnya telah tercapai sesuai dengan target akhir Renstra.

b) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**- Jumlah adminstrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi**

Indikator jumlah adminstrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi dengan target 65 berkas realisasinya yaitu 99 berkas yang diperoleh dari urusan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan ASN yang dilayani secara tertib. Dalam rangka mengupayakan peningkatan layanan adminstrasi umum pada Dinas Kominfo maka dilaksanakan penandatangan komitmen integritas bersama.

Gambar Komitmen bersama dalam upaya peningkatan layanan adminstrasi umum pada Dinas Kominfo



**- Jumlah Jumlah Kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal**

Indikator jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal dengan target 0 orang realisasinya yaitu 0 orang dengan persentase 0%. Hal ini disebabkan kurangnya minat ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengajukan diklat dan bimtek secara luring pada tahun 2022 sehingga anggarannya dilakukan pergeseran untuk membiayai belanja kegiatan yang lain, namun ada solusi bagi beberapa ASN yang tetap ingin mengikuti diklat yaitu diklat

secara virtual atau online.

- **Jumlah laporan pengelolaan aset daerah**

Terealisasi sebanyak 2 laporan dengan target 2 laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Laporan pengelolaan belanja modal dinas dan laporan pengelolaan barang habis pakai yang dibuat per triwulan untuk direkap selama satu tahun. Keberhasilan ini dicapai dengan pelaksanaan pengelolaan aset-aset daerah dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan rencana anggaran kas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

- **Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area**

Pada Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 8 dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area dengan target 8 dokumen laporan, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. 8 dokumen area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut terdiri dari 1) Manajemen perubahan; 2) Deregulasi kebijakan; 3) Penataan dan penguatan organisasi; 4) Penataan tata laksana; 5) Penataan manajemen SDM; 6) Penguatan akuntabilitas; 7) Penguatan pengawasan; dan 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

c) *Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum bagi Dinas.

2. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian.
3. Melaksanakan pengelolaan data aset dan BMD pada dinas.
4. Melaksanakan pelayanan persuratan dinas.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.713.900,- dari pagu sub kegiatan Rp 5.339.079,- dengan persentase capaian 88,29 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 625.179,-.
2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 27.195.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 35.939.516,- dengan persentase capaian 75.67 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 8.743.916,-.
3. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.898.100,- dari pagu sub kegiatan Rp 16.809.464,- dengan persentase capaian 94,58 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 911.364,-.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.000.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 13.000.000,- dengan persentase capaian 100 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 0,-.
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 192.102.865,- dari pagu sub kegiatan Rp 196.000.000,- dengan persentase capaian 98,01 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.897.135,-.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 115.727.962,- dari pagu sub kegiatan Rp 124.925.151,- dengan persentase capaian 92,64 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 9.197.189,-.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 582.629.060,- dari pagu sub kegiatan Rp 594.596.970,- dengan persentase capaian 97,99 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 11.967.910,-.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 56.214.500,- dari pagu sub kegiatan Rp 56.983.593,-

dengan persentase capaian 87,59 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 769.093,-.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 108.157.100,- dari pagu sub kegiatan Rp 111.674.298,- dengan persentase capaian 96,85 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.517.198,-.
10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.950.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 15.417.000,- dengan persentase capaian 90,48 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.467.000,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2022 sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan 1 orang dan 1 orang Pengelola Teknologi Informasi selaku staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 2 orang tenaga kontrak (PTT) pengadministrasi umum. Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kesadaran dan kedisiplinan para ASN dan Pegawai Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melengkapi dokumen administrasi umum dan kepegawaian.

- Mengupayakan perbaikan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagian besar dianggarkan pada Triwulan I 60% dan triwulan II 40%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada kegiatan untuk operasional rutin kantor sebagian besar dilaksanakan pada pada Triwulan I 60% dan triwulan II 40% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya:

- Kurangnya personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawain
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada di sekretariat.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak.
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyerat.
- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas.
- Menyiapkan sarana-prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada dinas.

## 5.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENT ASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan dinas	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	100%
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100%
Rata-Rata Capaian				100 %			

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah dokumen perencanaan dinas	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2.	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Rata-rata Capaian					100 %

### a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 sebesar 100%. Terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 3 indikator. Pada indikator jumlah dokumen perencanaan dinas dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja

Tahunan (Renja/RKT) Tahun Anggaran 2023; Indikator jumlah dokumen penganggaran yang tersusun dengan target 4 dokumen dengan hasil tercapai 4 dokumen yaitu dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022. Indikator jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun dengan target 1 dokumen laporan yaitu dokumen laporan kinerja tahun 2021 yang disusun pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen sehingga tercapai 100%. Semua indikator kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka dapat dianggap telah tercapai sesuai dengan target akhir Renstra.

*b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

**i. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun**

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen, yang berarti telah terealisasi 100%. Dokumen tersebut yaitu dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2023. Tersedianya dokumen perencanaan dinas sebagai bagian administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Gambar Dokumen Rencana Kerja (Renja) Diskominfo tahun 2023  
yang disusun pada tahun 2022



**ii. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun**

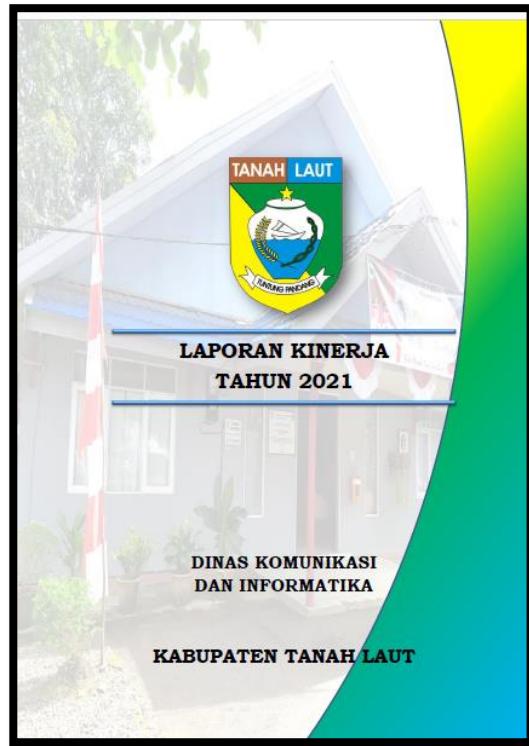
Terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan target 4 dokumen, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen penganggaran dinas yaitu dokumen dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun berkenaan.

**iii. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun**

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen yang berarti realisasi telah mencapai target

100%. Dokumen laporan kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahun 2021 yang disusun pada tahun 2022 yang berisi capaian/realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan selama tahun 2021.

Gambar Dokumen Laporan Kinerja (Lapkin) Diskominfo tahun 2021  
yang disusun pada tahun 2022



c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

Pencapaian kinerja pada sub bagian perencanaan dan keuangan didukung oleh pelaksanaan kinerja:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD.
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD.
3. Melaksanakan penyediaan dan pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai serta jaminannya
4. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan SKPD.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik dengan anggaran sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.525.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 8.900.000,- dengan persentase capaian 62,08 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 3.375.000,-.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.702.500,- dari pagu sub kegiatan Rp 8.520.000,- dengan persentase capaian 43,46 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 4.817.500,-.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 3.150.303.206,- dari pagu sub kegiatan Rp 3.808.380.717,- dengan persentase capaian 82,72 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 658.077.511,-.
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp 3.322.900,- dari pagu sub kegiatan Rp 4.480.000,- dengan persentase capaian 74,17 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.157.100,-.

*e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2022 sebanyak 4 orang

PNS yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan 3 orang staf pelaksana. Selain itu juga didukung oleh 1 orang tenaga kontrak (PTT) sebagai tenaga administrasi. Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Keuangan didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan cukup baik oleh para PNS dan tenaga kontrak pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terpenuhinya personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mumpuni di bidangnya.
3. Kerja sama seluruh bidang dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja SKPD.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada dianggarkan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I 60%, Triwulan II 13%, dan Triwulan III 27%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Triwulan I 16% dan triwulan II 84%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 70% dan Triwulan II 30% menyesuaikan anggaran kegiatan.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan.

### 5.3 Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan telekomunikasi

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTA SE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	10 SKPD	10 SKPD	100 %	10 SKPD	100%
		Jumlah aplikasi sistem ( <i>web service API</i> ) tandatangan digital terpusat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	100%
Rata-Rata Capaian				100%			

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	-	1 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	100 %
2.	Jumlah aplikasi sistem ( <i>web service API</i> ) tandatangan digital terpusat	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
	Rata-rata Capaian					100 %

a) *Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Persandian tahun 2022 telah tercapai sesuai target 100%. Terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi dengan target 10 SKPD dengan realisasi capaian 10 SKPD sehingga persentase capaiannya 100%, sedang indikator Jumlah aplikasi sistem (*web service API*) tandatangan digital terpusat dengan target 1 Aplikasi telah tercapai 100% (1 aplikasi). Kedua indikator ini jika dibandingkan dengan target capaian akhir Renstra maka telah tercapai 100% sesuai dengan target Renstra.

b) *Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian target tahun 2022 dengan tahun 2021 dengan terdiri dari 2 indikator, yaitu indikator Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi pada tahun 2022 telah dilakukan pada 10 SKPD sedangkan pada tahun 2021 hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena belum siapnya proses penilaian mandiri tersebut, sedangkan pada tahun 2020 masih belum pernah

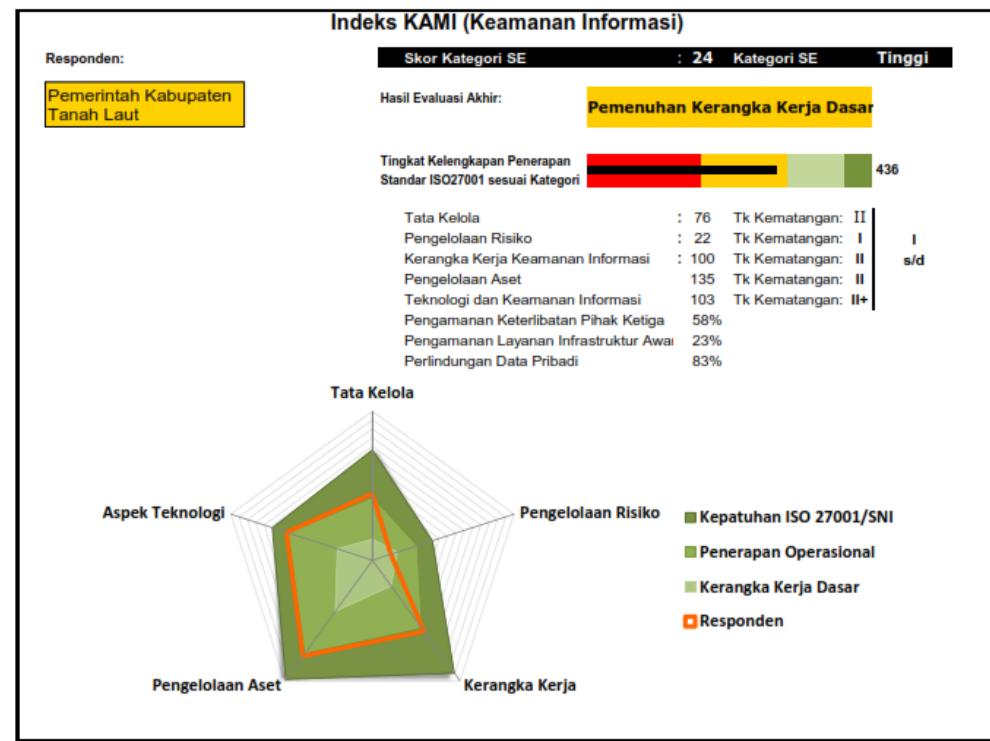
dilakukan penilaian sekalipun karena belum adanya persiapan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarannya sehingga belum ada capaian; pada indikator kedua yaitu Jumlah aplikasi sistem (*web service API*) tandatangan digital terpusat dengan target 1 Aplikasi telah tercapai 100%, indikator ini telah dapat dilaksanakan sejak tahun 2021. Secara teknis perlu kesiapan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan kesiapan sistem sendiri yang harus diujicobakan setelah dibangun.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi**

Pada tahun 2022 jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi telah tercapai 10 SKPD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah, sedangkan pada tahun 2021 hanya tercapai 1 SKPD (2,5%) hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena belum siapnya proses penilaian tersebut, sedangkan pada tahun 2020 masih belum pernah dilakukan penilaian sekalipun karena belum adanya persiapan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarannya sehingga belum ada capaian.

Gambar Capaian Indeks KAMI (keamanan informasi) tahun 2022



Gambar Sosialisasi pentingnya pengamanan informasi di Lingkup

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



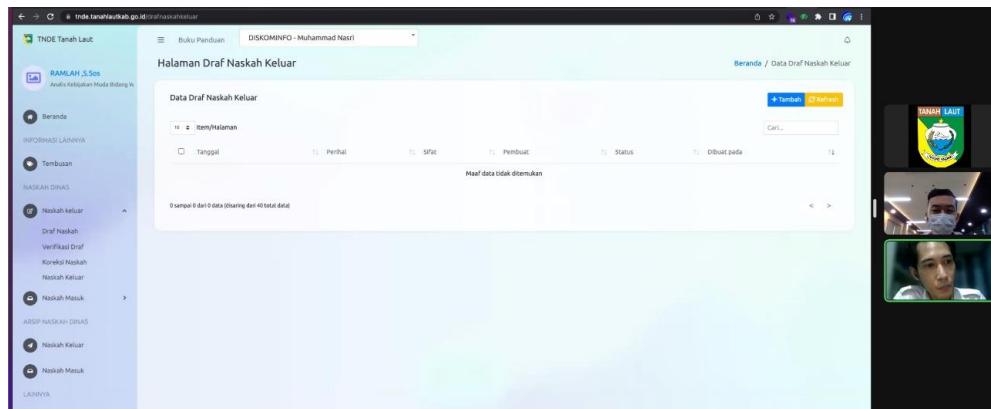
- **Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti realisasi telah tercapai 100%. Tahun 2022 ini Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah dibangun yang dapat dimanfaatkan ke beberapa aplikasi lainnya menggunakan layanan web service. selain itu dari BSrE juga menyediakan modul untuk integrasi sistem. Hal ini berarti agar bisa terus dimanfaatkan, maka sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE dari BSrE BSSN.

Gambar tampilan Sistem Tanda tangan Elektronik yang telah dibangun tahun 2022

The image consists of two screenshots of a web-based electronic signature system. The top screenshot shows the login page with a background illustration of a person signing a document. The page includes fields for NIP and Password, a 'LOGIN' button, and a note that it is developed by the Dinas Komunikasi dan Informatika of Tanah Laut. The bottom screenshot shows the dashboard, featuring a sidebar with 'Dashboard', 'Inbox', and 'Dokumen' options. The main area displays a 'Sertifikat Elektronik' card for 'Muhammad Nasri, S.ST' with his photo, NIP, and a note about his electronic signature status. A large 'Informasi' box on the right contains a section titled 'Syarat Upload Dokumen' with instructions and a 'Contoh visualisasi' section showing a sample document.

Gambar Screenshot saat kegiatan uji kesesuaian dengan BSrE secara Online



*d) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan inventarisasi seluruh SKPD untuk diusulkan kembali terkait penggunaan tanda tangan elektronik ke BSSN.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan personil yang ada dalam memahami tentang persandian dan keamanan informasi.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya keamanan informasi.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persandian hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 37.293.750,- dari pagu sub kegiatan Rp 49.971.151,- dengan persentase capaian 74,63 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 12.677.401,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi tahun 2022 hanya ada 1 orang PNS yaitu Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, tanpa ada dukungan tenaga kontrak. Analisis terkait capaian kegiatan pada Seksi Persandian dapat dikatakan sangat minim mengingat minimnya anggaran yang ada pada seksi persandian namun tahun 2022 telah diupayakan beberapa hal diantaranya:

- Minimnya tenaga personil yang ada pada seksi Persandian sehingga hanya dapat melaksanakan tahap awal pengusulan pemanfaatan persandian dengan menggunakan tanda tangan elektronik ke Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
- Melaksanakan peningkatan SDM pada seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dengan mengikuti kegiatan pelatihan maupun bimtek secara virtual.

f) *Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan pada Triwulan I 100%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Triwulan I

80% dan Triwulan II 20% menyesuaikan ketersediaan anggaran.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Kurangnya personil yang ada pada Seksi Persandian khususnya untuk jabatan fungsional Sandiman maupun operator Sandi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis persandian dan keamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. SDM yang dimiliki belum cukup memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
4. Belum tersedianya ruangan representatif untuk pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
5. Adanya perubahan Sistem dari BsrE BSSN sehingga sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE BSrE BSSN.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil teknis Persandian dan keamanan informasi pada bidang Statistik dan Persandian.
2. Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat terkait Persandian dan Keamanan Informasi.

3. Melakukan sosialisasi tentang Persandian dan pentingnya keamanan informasi.
4. Pemenuhan fasilitas penunjang pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
5. Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BSrE terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru.
6. Asistensi penerapan modul TTE BSrE untuk integrasi ke sistem yang sudah ada
7. Mempersiapkan server *development/production* untuk uji coba penerapan sistem yang sudah diperbarui.

#### 5.4 Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengisian indikator pada aplikasi Satu Data Tanah Laut	Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	1 aplikasi	100%
		Jumlah cetak dokumen Statistik Sektoral daerah	1 buku	1 buku	100%	1 buku	100%
		Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/element aplikasi Satu Data Tanah Laut	20 orang	20 orang	100 %	40 orang	50%
Rata-Rata Capaian				100 %			

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2022		
		2020	2021	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %
2.	Jumlah cetak dokumen Statistik Sektoral daerah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%
3.	Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/element aplikasi Satu Data Tanah Laut	-	20 orang	20 orang	20 orang	100%
		Rata-rata Capaian				100 %

*a) Perbandingan Realisasi Dengan Target*

Rata-rata capaian Kepala Seksi Pengelolaan Statistik tahun 2022 telah tercapai 100%. Terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai dengan target 1 aplikasi tercapai 100% (1 aplikasi), indikator Jumlah buku cetak dokumen Statistik Sektoral daerah dengan target 1 buku tercapai 100% (1 buku), dan indikator Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/element aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 100% (20 orang).

*b) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait*

Perbandingan pencapaian target tahun 2022 dengan tahun 2021 terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai telah tercapai 1 aplikasi pada tahun 2022 dan di tahun 2021 juga tercapai 1 aplikasi; pada indikator jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah pada tahun 2022 telah tercapai 1 buku dan tahun 2021 juga tercapai 1 buku; pada indikator ketiga yaitu jumlah admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian

Indikator/Elemen aplikasi Satu Data Tanah Laut telah tercapai 20 orang sesuai dengan target 20 orang pada tahun 2022 demikian juga untuk capaian tahun 2021. Secara keseluruhan persentase capaian tahun 2022 adalah 100%, namun akan tetap dilakukan penyesuaian dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD dalam rangka terwujudnya satu data indonesia. Seluruh indikator pada Seksi Penglolaan Statistik telah tercapai sesuai target akhir Renstra, hanya pada indikator jumlah admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/element aplikasi Satu Data Tanah Laut yang capaiannya 50%, artinya masih belum tercapai 100% sesuai dengan target akhir Renstra. Untuk ke depannya pada indikator ini akan lebih difokuskan dalam pencapaian kinerja sesuai dengan target akhir Renstra.

c) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

- **Jumlah aplikasi Satu Data yang memadai**

Terealisasi sebanyak 1 aplikasi dengan target 1 aplikasi, yang berarti telah terealisasi 100%. Tersedianya aplikasi Satu Data yang memadai bertujuan agar data yang tersedia dapat akurat dan dipertanggungjawabkan. Beberapa data dari beberapa SKPD dikumpulkan ke dalam satu sistem aplikasi yaitu aplikasi Satu Data yang diinputkan langsung oleh masing-masing admin SKPD sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan data yang mendasar. Kedepannya Aplikasi Satu Data masih harus dikembangkan seiring berkembangnya kebutuhan-kebutuhan data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Gambar tampilan aplikasi Satu Data Tanah Laut *Update* fitur aplikasi pada tahun 2022



#### - **Jumlah buku data statistik sektoral**

Terealisasi sebanyak 1 buku dengan target 1 buku, yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Keberhasilan atas capaian ini merupakan usaha dari seluruh elemen terkait dalam usaha mengumpulkan dan meninjau data ke dalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut. Dari seluruh data yang terhimpun akan diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sektoral oleh analis statistik dan Kepala Seksi Pengelolaan Statistik sesuai bimbingan Kepala Bidang Statistik dan Persandian serta arahan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian data tersebut disusun menjadi buku data statistik sektoral daerah Kabupaten Tanah Laut atau diberi nama ikhtisar statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut. Beberapa permasalahan yang dihadapi ialah perlunya menambah wawasan bagi admin Satu Data Tanah Laut dalam pengelolaan data karena data dalam aplikasi perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi statistik yang bisa dipublikasikan sehingga perlu penyusunan buku-buku

statistik yang lain. Perlunya pemanfaatan satu data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Gambar Cetak Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut Data Pembangunan tahun 2021 yang disusun pada tahun 2022



- **Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian indikator/element aplikasi Satu Data Tanah Laut**

Pada tahun 2022 pada indikator ini telah terealisasi sebanyak 20 orang dengan target 20 orang yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Adapun 20 orang ini berasal dari 20 SKPD yaitu Inspektorat, Dinsos, Disnakeswan, Disnakerind, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, DPMPTSP, BPKAD, Disdikbud, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, dan Kecamatan Bumi Makmur. Kegiatan pengisian indikator isian/element

aplikasi Satu Data Tanah Laut pada tahun 2022 merupakan tahapan kedua sejak dilaksanakan pada tahun 2021 yang juga diikuti oleh 20 SKPD. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 tahapan disebabkan terbatasnya anggaran dan tenaga pada Seksi Pengelolaan Statistik. Namun meskipun demikian, dalam kegiatan ini seluruh admin SKPD telah bersungguh-sungguh mengikuti proses belajar dan menginput data ke dalam aplikasi Satu Data. Untuk ke depannya perlu menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan bagi seluruh admin Satu Data dalam pengisian indikator Satu Data.

*c) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja*

1. Melaksanakan sosialisasi Satu Data Tanah Laut ke SKPD di Lingkup Pemkab Tanah Laut.
2. Melaksanakan pemantauan keterisian data pada aplikasi Satu Data per bulan..
3. Melaksanakan pengembangan dan update aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Melaksanakan koordinasi terkait program kegiatan bidang statistik dan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Melaksanakan pencetakan Buku Ikhtisar Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut dalam upaya penyusunan dokumen statistik sektoral daerah.

*d) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*

Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Keigatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.370.000,- dari pagu sub kegiatan Rp 49.805.090,- dengan persentase capaian 95,11 % dengan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 2.435.090,-.

e) *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia yang ada pada Seksi Pengelolaan Statistik tahun 2022 sebanyak 1 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Pengelolaan Statistik yang hanya dibantu oleh 1 orang tenaga kontrak (PTT) sebagai staf pelaksana. Keberhasilan capaian kegiatan pada Seksi Pengelolaan Statistik didukung oleh beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

1. Dalam penyusunan data statistik sektoral daerah menggunakan SDM admin seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengisian data statistik.
2. Proses pengolahan akhir buku statistik Sektoral dengan melibatkan tenaga kontrak pada internal Dinas Komunikasi dan Informatika serta tenaga dari pegawai BPS Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh SKPD dalam hal pengisian data dan selaku produsen data yang bertanggung jawab atas data yang diisikan pada aplikasi Satu Data Tanah Laut.

*f) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja*

- Rencana aksi anggaran pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dianggarkan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.
- Rencana aksi kinerja pada Seksi Pengelolaan Statistik pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dilaksanakan pada Triwulan I 10%, Triwulan II 70% dan Triwulan IV 20%.

*g) Kendala dan Perbaikan Kedepannya*

Kendala yang ada pada Seksi Pengelolaan Statistik, diantaranya:

1. Hanya ada satu orang PTT sebagai personil/staf pelaksana pada Seksi Pengelolaan Statistik.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas teknis terkait pengelolaan statistik.
3. Setiap SKPD hanya menunjuk satu orang admin untuk melakukan input data pada aplikasi sehingga sering terlambat dalam input data.
4. Belum Lengkapnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

1. Melakukan pengusulan penambahan personil/staf teknis ASN dalam pengelolaan statistik.

2. Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan/ bimbingan teknis/diklat terkait pengelolaan statistik.
3. Melakukan sosialisasi tentang petunjuk pengisian aplikasi Satu Data Tanah Laut.
4. Peningkatan SDM admin setiap SKPD dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
5. Pengembangan aplikasi satu data Tanah Laut yang lebih sederhana serta penyediaan data-data yang update secara berkala oleh produsen data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.
7. Bersama BPS Tanah Laut melakukan sosialisasi untuk pendampingan penyusunan metadata statistik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## A. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022

#### Ringkasan Realisasi APBD SKPD 2021 dan 2022

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD  
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

No .	Uraian	Realisasi			%	Realisasi			%	Peningkatan /Penurunan (%)
		Pagu Tahun 2021	Pagu APBD-P Tahun 2021	Tahun 2021		Pagu Tahun 2022	Pagu APBD-P Tahun 2022	Tahun 2022		
		( Rp. )	( Rp. )	( Rp. )		( Rp. )	( Rp. )	( Rp. )		
1	2	4	4	5						
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>530.496.000</b>	<b>550.144.000</b>	<b>564.880.000</b>	<b>102,68</b>	<b>555.056.000</b>	<b>555.056.000</b>	<b>562.424.000</b>	<b>101,33</b>	<b>-1,35</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>530.496.000</b>	<b>550.144.000</b>	<b>564.880.000</b>	<b>102,68</b>	<b>555.056.000</b>	<b>555.056.000</b>	<b>562.424.000</b>	<b>101,33</b>	<b>-1,35</b>
	Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	530.496.000	550.144.000	564.880.000	102,68	555.056.000	555.056.000	562.424.000	101,33	-1,35
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.136.084.538</b>	<b>13.095.733.027</b>	<b>11.198.671.599</b>	<b>85,51</b>	<b>10.349.826.905</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.517.772.688</b>	<b>90,87</b>	<b>5,36</b>
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.599.796.191</b>	<b>11.478.817.543</b>	<b>9.709.018.913</b>	<b>84,58</b>	<b>10.247.326.905</b>	<b>10.216.094.879</b>	<b>9.298.654.938</b>	<b>91,02</b>	<b>6,44</b>
	- Belanja Pegawai	4.017.535.928	4.017.535.928	2.871.055.199	71,46	4.108.380.717	3.808.380.717	3.150.303.206	82,72	11,26
	- Belanja Barang dan Jasa	6.582.260.263	7.461.281.615	6.837.963.714	91,65	6.138.946.188	6.407.714.162	6.148.351.732	95,95	4,3
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.536.288.347</b>	<b>1.616.915.484</b>	<b>1.489.652.686</b>	<b>92,13</b>	<b>102.500.000</b>	<b>258.382.040</b>	<b>219.117.750</b>	<b>84,80</b>	<b>-7,33</b>

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.203.788.347	1.458.315.484	1.344.627.686	92,20	0	133.682.040	110.062.750	82,33	-9,87
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.500.000	27.500.000	15.500.000	56,36	0	0	0	0	-56,36
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.000.000	131.100.000	129.525.000	98,80	102.500.000	124.700.000	109.055.000	87,45	-11,35
<b>Jumlah</b>	<b>13.136.084.538</b>	<b>13.095.733.027</b>	<b>11.198.671.599</b>	<b>85,51</b>	<b>10.349.826.905</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.521.530.688</b>	<b>90,87</b>	<b>5,36</b>

Gambaran tabel 3.26 tersebut di atas menunjukan bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2022 ada penurunan 1,35 % dari tahun 2021, namun pendapatan pada tahun 2022 masih melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya tambahan pendapatan dari pembayaran retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi atas bangunan menara yang telah dibangun pada tahun 2022. Pada pos belanja tahun ini realisasi penyerapan dananya sebesar Rp. 9.517.772.688 (90,87%), ada kenaikan sebesar 5,36 % dari belanja tahun 2021 sebesar Rp. 11.198.671.599 (85,51%), hal ini menunjukkan adanya pencapaian kinerja yang cukup baik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.27 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		( Rp. )	( Rp. )	
1	2	4	4	5
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>555.056.000</b>	<b>562.424.000</b>	<b>7.368.000</b>
1.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>555.056.000</b>	<b>562.424.000</b>	<b>7.368.000</b>
	Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	555.056.000	562.424.000	7.368.000
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.517.772.688</b>	<b>956.704.231</b>
2.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.216.094.879</b>	<b>9.298.654.938</b>	<b>917.439.941</b>
	- Belanja Pegawai	3.808.380.717	3.150.303.206	658.077.511
	- Belanja Barang dan Jasa	6.407.714.162	6.148.351.732	259.362.430
2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>258.382.040</b>	<b>219.117.750</b>	<b>40.264.290</b>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.682.040	110.062.750	23.619.290
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
	- Belanja Modal Aset Tatap Lainnya	124.700.000	109.055.000	15.645.000
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>9.919.420.919</b>	<b>8.955.348.688</b>	<b>964.072.231</b>

Dilihat dari pendapatan yang diperoleh dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini masih mengalami **SILPA** anggaran pembiayaan sebesar **Rp. 964.072.231,-** (*Sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*).

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

### - Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.28 Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I	- Administrasi umum dan kepegawaian - Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.000.965.788	4.292.442.693	85,83 %
II	Penyebaran informasi dan komunikasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.420.881.290	2.290.440.245	94,61 %
III	Pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.952.853.600	2.850.226.000	96,52 %
IV	Kualitas data statistik sektoral SKPD	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	49.805.090	47.370.000	95,11 %
V	Pemanfaatan sandi (keamanan informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	49.971.151	37.293.750	74,63 %
		<b>Jumlah</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.517.772.688</b>	<b>90,87 %</b>

### 3. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	90,87 %	113,09%	22,22%
2	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	96,52 %	112,36%	15,84%
3	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	96,52 %	100%	3,48%
4	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	96,52 %	100%	3,48%
5	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebarluaskan	94,61 %	100%	5,39%
6	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	94,61 %	100%	5,39%
7	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	74,63 %	112,5%	37,87%
8	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	85,83 %	100%	14,09%
9	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB SKPD Nilai SAKIP SKPD	85,83 %	101,04%	15,13%
10	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	95,11 %	100%	4,89%

#### 4. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

TABEL 3.25 Tabel Realisasi APBD Tahun 2021 dan 2022

No	Tahun 2021				Tahun 2022			
	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%	Program/Kegiatan (sub kegiatan)	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.992.776	29.153.476	78,81	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.420.000	9.227.500	52,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	5.525.000	62,08
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.515.000	1.900.000	75,55	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.000	100.000	4,37	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.740.000	1.032.500	37,68	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.440.000	807.500	33,09	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.440.000	2.212.500	64,32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.267.776	23.100.976	99,28	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000	3.702.500	43,46
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.022.075.928</b>	<b>2.873.866.100</b>	<b>71,45</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.812.860.717</b>	<b>3.153.626.106</b>	<b>82,71</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.535.928	2.871.055.199	71,46	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717	3.150.303.206	82,72
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000	3.322.900	74,17
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.900.000	1.740.901	60,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-
7.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1.140.000	570.000	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	-	-	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.632.800</b>	<b>27.524.000</b>	<b>89,85</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.632.800	27.524.000	89,85	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>416.410.308</b>	<b>379.295.092</b>	<b>91,09</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>267.088.059</b>	<b>252.910.465</b>	<b>94,69</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.648.500	3.402.000	60,23	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.339.079	4.713.900	88,29
1.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.570.920	22.500.750	63,26	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.939.516	27.165.600	75,67
	Penyediaan bahan logistik kantor	20.230.700	20.228.200	99,99	Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.579.150	6.894.600	41,59	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.809.464	15.898.100	94,58
	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000	13.000.000	100
1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.381.038	326.269.542	96,42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000	192.102.865	98,01
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>278.676.600</b>	<b>251.689.436</b>	<b>90,32</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Mebel	82.799.610	60.759.436	73,38	Pengadaan Mebel	-	-	-
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.876.990	192.030.000	98,04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>210.012.238</b>	<b>155.516.142</b>	<b>74,05</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>719.522.121</b>	<b>698.357.022</b>	<b>97,06</b>
1.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.401.152	49.179.324	95,68	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.999.600	71.807.522	57,91	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.925.151	115.727.962	92,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.611.486	34.529.296	99,76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.596.970	582.629.060	97,99

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118.424.552</b>	<b>111.322.052</b>	<b>94,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>184.074.891</b>	<b>178.321.600</b>	<b>96,87</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.909.772	6.052.500	87,59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.983.593	56.214.500	98,65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.379.228	30.588.700	84,08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.674.298	108.157.100	96,85
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	23.400.000	100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.417.000	13.950.000	90,48
2.4	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau	51.735.552	51.280.852	99,12	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
5	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.218.789.432</b>	<b>2.918.423.057</b>	<b>90,19</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.420.881.290</b>	<b>2.290.440.245</b>	<b>94,61</b>
5.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16.762.000	14.088.300	84,05	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	199.934.566	192.367.082	96,22	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	-
	Pengelolaan Media Komunikasi public	117.947.776	92.046.664	78,04	Pengelolaan Media Komunikasi publik	2.096.250.150	1.980.310.000	94,47
	Pelayanan Informasi Publik	444.854.620	339.959.761	76,42	Pelayanan Informasi Publik	324.631.140	310.130.245	95,53

	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.439.290.470	2.279.961.250	93,47	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	-
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			
4	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.728.794.139	2.580.416.867	94,56	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.881.153.600	2.787.251.000	94,56
4.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.728.794.139	2.580.416.867	94,56	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600	2.787.251.000	96,74
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.915.973.864	1.787.845.377	93,31	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.700.000	62.975.000	87.83
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	24.650.000	2.905.000	11,78	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.403.673.865	1.313.695.377	93,59	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	-	-
4.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	147.999.999	141.000.000	95,27	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000	62.975.000	87.83
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	339.650.000	330.245.000	97,23	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	-
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			
8	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.910.000	50.345.000	67,21	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.805.090	47.370.000	95,11

8.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	74.910.000	50.345.000	67,21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	49.805.090	47.370.000	95,11
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			
6	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.040.390	32.175.000	73,06	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.805.090	47.370.000	95,11
6.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.040.390	32.175.000	73,06	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151	32.175.000	73,06
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.095.733.027</b>	<b>11.198.671.599</b>	<b>85,51</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>10.474.476.919</b>	<b>9.517.772.688</b>	<b>90,87</b>

Dari tabel perbandingan realisasi anggaran capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 dengan Tahun 2022 di atas dapat dilihat bahwa belanja tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp 13.095.733.027,- telah terealisasi sebesar Rp 11.198.671.599,- dengan persentase 85,51 % sedangkan pada tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 10.474.476.919,- telah terealisasi sebesar Rp 9.521.530.688,- dengan persentase 90,87 %. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi sebesar 5,36 %. Pagu anggaran belanja yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2022, di mana tahun 2022 fokus kegiatan pada pencapaian akhir renstra dan RPJMD sehingga diperlukan efisiensi dan efektivitas anggaran pada kegiatan yang prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Koordinasi antar instansi sudah cukup optimal dalam mendukung terlaksananya implementasi SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan membentuk tim internal evaluasi mandiri SPBE dalam rangka pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut dengan menyusun jadwal kegiatan evaluasi mandiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan **realisasi fisik 99,49%** dan **realisasi keuangan 90,87 %**, dengan kategori capaian realisasi fisik **sangat tinggi** dan realisasi keuangan **sangat tinggi**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan

kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah membuat rancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun kedepannya yang meliputi sebagai berikut:

### **1. Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City***

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

### **2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.**

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbarukan guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan

tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

### **3. Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah SPBE.**

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

### **4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.**

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbang kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

### **5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.**

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat perlu direspon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

Pelaihari, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. MUSEIN IRIANTA

NIP. 19630720 198503 1 015

# LAMPIRAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR :  
TANGGAL :

**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kabupaten : Tanah Laut  
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.  
Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPT Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Hasil Penilaian SPBE dari Menpan RB	Dinas Kominfo

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP.19760203 199903 2 008

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022; dan

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelayaran dan Perikanan tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (*empat ratus lima puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

KEDUA : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (*seratus tiga*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

KETIGA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2022

HASIL PEMANTAUAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

**Hasil Pemantauan SPBE Kementerian**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2,92	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2,60	Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,93	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2,68	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,90	Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3,84	Sangat Baik
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,01	Baik
8	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,32	Baik
9	Kementerian Dalam Negeri	3,63	Sangat Baik
10	Kementerian Pertahanan	2,62	Baik
11	Kementerian Pertanian	3,75	Sangat Baik
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,51	Sangat Baik
13	Kementerian Perhubungan	3,33	Baik

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Banjar	2,56	Cukup
2	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tapin	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
5	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabalong	2,00	Cukup
7	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Balangan	2,44	Cukup
10	Pemerintah Kota Banjarmasin	3,31	Baik
11	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,26	Cukup

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,11	Cukup
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paser	2,13	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,81	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Timur	2,79	Baik
6	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	1,82	Cukup
7	Pemerintah Kota Samarinda	2,44	Cukup
8	Pemerintah Kota Balikpapan	3,05	Baik
9	Pemerintah Kota Bontang	2,70	Baik

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1,98	Cukup
2	Pemerintah Kab. Bulungan	2,32	Cukup
3	Pemerintah Kota Tarakan	2,11	Cukup

### Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Minahasa	1,80	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,74	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,09	Cukup
6	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	1,51	Kurang

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,47	Cukup
2	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,33	Cukup
3	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	1,71	Kurang

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,10	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,09	Cukup
3	Pemerintah Kab. Manokwari	1,60	Kurang
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	1,16	Kurang
6	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1,39	Kurang
7	Pemerintah Kota Sorong	1,72	Kurang

**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,61	Baik
3	Pemerintah Kab. Jayawijaya	1,51	Kurang
4	Pemerintah Kab. Keerom	1,39	Kurang
5	Pemerintah Kota Jayapura	1,85	Cukup

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



ABDULLAH AZWAR ANAS



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : diskominfo.tala@gmail.com website : www.diskominfo.tanahlautkab.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. SUHARYO

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**H. SUKAMTA**

**Ir. SUHARYO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

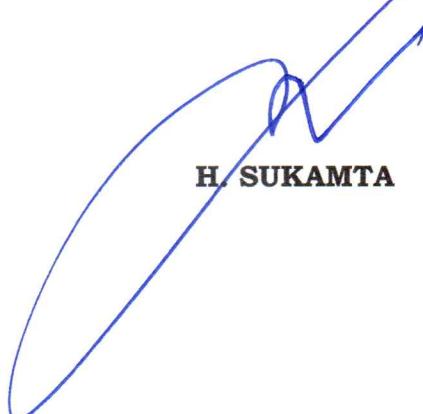
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.75

<b>Program</b>			<b>Anggaran</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.000.965.788,-
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.420.881.290,-
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp	2.952.853.600,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	49.805.090,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	49.971.151,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 10.474.476.919,-</b>

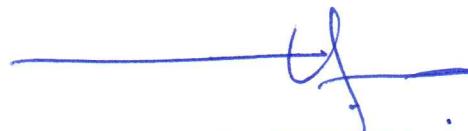
Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
 Bupati Tanah Laut



**H. SUKAMTA**

Pihak Pertama,  
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



**Ir. SUHARYO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640502 198703 1 020**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HADI, S.ST, MT  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUHARYO  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Plt. Sekretaris

Ir. SUHARYO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

SRI HADI, S.ST, MT  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19740910 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi utama dan kepegawaian	1. Persentase tata kelola administrasi utama dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai RB SKPD 3. Nilai SAKIP SPKD	84 nilai 81 nilai

<b>Program</b>				<b>Anggaran</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 5.000.965.788,-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 5.000.965.788,-</b>

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas



**Ir. SUHARYO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640502 198703 1 020**

Pihak Pertama,  
Plt. Sekretaris



**SRI HADI, S.ST, MT**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19740910 199903 1 005**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814

Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HADI, S.ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Komunikasi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUHARYO  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Komunikasi

SRI HADI, S.ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19740910 199903 1 005

Ir. SUHARYO

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**BIDANG KOMUNIKASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	1. Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah	100 %
2.	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	2. Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %

Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.096.250.150,-
			Pelayanan Informasi Publik	324.631.140,-
		<b>Jumlah</b>		<b>2.420.881.290,-</b>

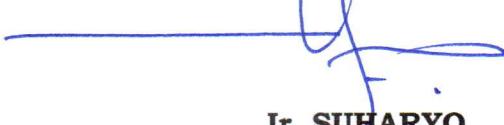
Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Komunikasi



**SRI HADI S.S.T, MT**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19740910 199903 1 005**

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas



**Ir. SUHARYO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640502 198703 1 020**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADERIANSYAH, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUHARYO  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

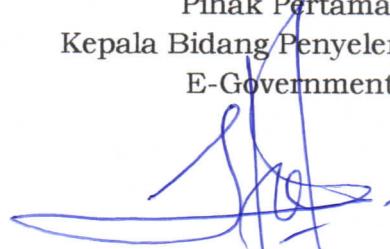
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas



Ir. SUHARYO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

Pelaihari, Oktober 2022  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
E-Government



HADERIANSYAH, S.Sos  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19800504 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>N0</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
			<b>3</b>
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %
2.	Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %
3.	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %

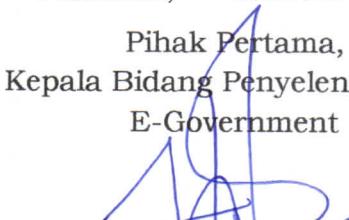
<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600,-
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>2.952.853.600,-</b>

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Penyelenggaraan  
 E-Government



**Ir. SUHARYO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640502 198703 1 020**



**HADERIANSYAH, S.Sos**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 19800504 200903 1 004**



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL ANWAR, S. Kom  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUHARYO  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Ir. SUHARYO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

MIFTAHUL ANWAR, S. Kom  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19830424 200903 1 013

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

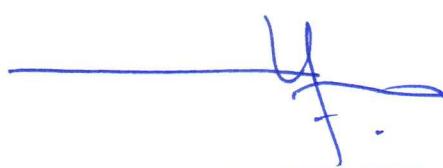
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	1. Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	20 %
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	2. Persentase statistik sektoral daerah	100 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	49.805.090
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151
Jumlah				99.776.241

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Statistik dan Persandian



**Ir. SUHARYO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640502 198703 1 020**



**MIFTAHUL ANWAR, S. Kom**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
**NIP. 19830424 200903 1 013**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI, S.Kom  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI HADI, S.ST, MT  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Plt. Sekretaris



**SRI HADI, S.ST, MT**  
**NIP. 19740910 199903 1 005**

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Perencanaan  
dan Keuangan



**AHMAD FAUZI, S.Kom**  
**NIP. 19900928 201502 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	1. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun.	2 dokumen
		2. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun.	4 dokumen
		3. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun.	1 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000,-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717,-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>3.830.280.717,-</b>

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
 Plt. Sekretaris

  
SRI HADI, S.ST, MT  
 NIP. 19740910 199903 1 005

Pihak Pertama,  
 Kepala Sub Bagian Perencanaan  
 dan Keuangan

  
AHMAD FAUZI, S.Kom  
 NIP. 19900928 201502 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA AZIZAH, SKM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI HADI, S.ST, MT  
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Plt. Sekretaris

**SRI HADI, S.ST, MT**  
**NIP. 19740910 199903 1 005**

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian

**YULIA AZIZAH, SKM**  
**NIP. 19841106 200903 2 009**

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi	1. Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi 2. Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal 3. Jumlah laporan pengelolaan aset daerah 4. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area	65 Berkas 0 Orang 2 laporan 8 dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.339.079,- 35.939.516,- 16.809.464,- 13.000.000,- 196.000.000,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.925.151,- 594.596.970
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.983.593,- 111.674.298,- 15.417.000,-
		<b>Jumlah</b>		<b>1.170.685.071,-</b>

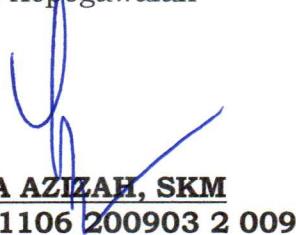
Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Plt. Sekretaris



**SRI HADI, S.S.T, MT**  
NIP. 19740910 199903 1 005

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian



**YULIA AZIZAH, SKM**  
NIP. 19841106 200903 2 009



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUSLAINI, S.Kom  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Statistik  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MIFTAHUL ANWAR, S.Kom  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian

**MIFTAHUL ANWAR, S.Kom**  
**NIP. 19830424 200903 1 013**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengelolaan Statistik

**AHMAD MUSLAINI, S.Kom**  
**NIP. 19830829 200501 1005**

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut	1. Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai 2. Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah 3. Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen Aplikasi Satu Data Tanah Laut	1 aplikasi 1 buku 20 orang

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian



**MIFTAHUL ANWAR, S.Kom**  
NIP. 19830424 200903 1 013

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengelolaan Statistik



**AHMAD MUSLAINI, S.Kom**  
NIP. 19830829 200501 1005



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut 70814  
Email : [diskominfo.tala@gmail.com](mailto:diskominfo.tala@gmail.com) website : [www.diskominfo.tanahlautkab.go.id](http://www.diskominfo.tanahlautkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NASRI, S.ST  
Jabatan : Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MIFTAHUL ANWAR, S.Kom  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian

**MIFTAHUL ANWAR, S.Kom**  
NIP. 19830424 200903 1 013

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Persandian

**MUHAMMAD NASRI, S.ST**  
NIP. 19861029 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022**  
**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

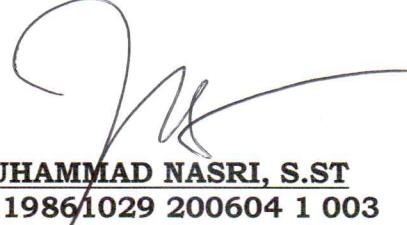
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi	1. Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	20 SKPD
		2. Jumlah aplikasi Sistem (web service API) tandatangan digital terpusat	1 Aplikasi

Pelaihari, Oktober 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Statistik dan Persandian

  
**MIFTAHUL ANWAR, S.Kom**  
**NIP. 19830424 200903 1 013**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Persandian

  
**MUHAMMAD NASRI, S.ST**  
**NIP. 19861029 200604 1 003**

**POHON KINERJA (Rancangan Sesuai Tugas dan Fungsi)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT**

2018 - 2023

**MEWUJUDKAN**

MISI KE-1 : BERKARYA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

MISI KE-2 : MENCiptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

MISI KE-3 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)



**Kinerja Utama:**

Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut

**Indikator:**

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



**BIDANG KOMUNIKASI**

Kinerja:

1. Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut
2. Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi

Indikator:

1. Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah
2. Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi

**BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Kinerja:

1. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut
2. Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut
3. Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi

Indikator:

1. Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2. Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id
3. Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi

**BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Kinerja:

1. Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD

Indikator:

1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
2. Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut

**SEKRETARIAT**

Kinerja:

1. Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian
2. Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas

Kinerja

Indikator:

1. Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu
2. Nilai RB SKPD
3. Nilai SAKIP SKPD

**SEKSI PENGELOLAAN STATISTIK**

Kinerja:

Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Indikator pada Aplikasi Satu Data Tanah Laut

Indikator:

1. Jumlah Aplikasi Satu Data yang memadai
2. Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah
3. Jumlah Admin Satu Data SKPD yang mampu dalam pengisian Indikator/Elemen Aplikasi Satu Data Tanah Laut

**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Kinerja:

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan pemenuhan dokumen laporan reformasi birokrasi

Indikator:

1. Jumlah administrasi umum dan kepegawaian yang terpenuhi.
2. Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal.
3. Jumlah laporan pengelolaan aset daerah.
4. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi per area

SEKSI PERSANDIAN, KEAMANAN INFORMASI DAN  
TELEKOMUNIKASI

Kinerja:

Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan persandian, keamanan informasi

Indikator:

1. Jumlah SKPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi
2. Jumlah aplikasi Sistem (web service API) tandatangan digital terpusat
3. Jumlah sosialisasi persandian dan keamanan informasi

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kinerja:

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tanah Laut

Indikator:

1. Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun
2. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun.
3. Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun.

Pelaihari, 08 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Laut



**Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022**  
**TRIWULAN IV**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		
				I				II		III		IV			
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Samua Bidang</b>															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.000.965.788		988.507.063		1.016.465.615		1.223.890.666		1.063.579.349		4.292.442.693	85,83%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	17.420.000	20	-	30	-	70	5.702.500	100	3.525.000	100	9.227.500	100,00% 52,97%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	5	8.900.000	2	-	1	-	1	2.000.000	1	3.525.000	5	5.525.000	100,00% 62,08%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	4	8.520.000	1	-	1	-	1	3.702.500	1	-	4	3.702.500	100,00% 43,46%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100	3.812.860.717	25	778.373.805	50	680.684.945	75	954.158.445	100	740.408.911	100	3.153.626.106	100,00% 82,71%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	20	3.808.380.717	22	778.373.805	20	680.684.945	18	954.135.545	19	737.108.911	20	3.150.303.206	98,75% 82,72%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	71	4.480.000	12	-	5	-	45	22.900	9	3.300.000	71	3.322.900	100,00% 74,17%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	267.088.059	20	33.735.006	45	120.535.181	80	41.909.500	100	56.730.778	100	252.910.465	100,00% 94,69%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat Komponen listrik (Jenis)	6	5.339.079	-	-	-	-	6	4.713.900	-	-	6	4.713.900	100,00% 88,29%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	3	35.939.516	3	-	3	13.843.000	3	13.352.600	3	-	3	27.195.600	100,00%	75,67%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan (Jenis)	7	16.809.464	4	1.650.000	1	11.440.100	1	1.908.000	1	900.000	7	15.898.100	100,00%	94,58%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	13.000.000	-	-	-	-	-	-	2	13.000.000	2	13.000.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	50	196.000.000	15	32.085.006	16	95.252.081	8	21.935.000	11	42.830.778	50	192.102.865	100,00%	98,01%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	719.522.121	25	158.818.252	45	172.388.589	70	187.668.221	100	179.481.960	100	698.357.022	100,00%	97,06%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayarkan (Jenis)	3	124.925.151	3	24.386.272	3	26.500.649	3	29.586.981	3	35.254.060	3	115.727.962	100,00%	92,64%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	3	594.596.970	3	134.431.980	3	145.887.940	3	158.081.240	3	144.227.900	3	582.629.060	100,00%	97,99%
	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	23		23		23		23		23		23		100,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	184.074.891	30	17.580.000	60	42.856.900	80	34.452.000	100	83.432.700	100	178.321.600	100,00%	96,87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (Unit)	1	56.983.593	1	1.650.000	1	22.154.500	1	7.110.000	1	25.300.000	1	56.214.500	100,00%	98,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	8	111.674.298	8	14.130.000	6	13.002.400	7	25.292.000	8	55.732.700	8	108.157.100	100,00%	96,85%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	31	15.417.000	4	1.800.000	21	7.700.000	3	2.050.000	3	2.400.000	31	13.950.000	100,00%	90,48%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,05%	85,83%
													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2.420.881.290		75.507.845		573.658.500		555.171.000		1.086.102.900		2.290.440.245		94,61%

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (%)	100	2.420.881.290	30	75.507.845	44	573.658.500	60	555.171.000	100	1.086.102.900	100	2.290.440.245	100,00%	94,61%
Pengelelahan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dimanfaatkan dan dikelola dinas (Media)	15	2.096.250.150	15	50.000.000	15	530.250.000	15	505.050.000	15	895.010.000	15	1.980.310.000	100,00%	94,47%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data yang diliinformasikan pada website PPID (Data/Informasi)	300	324.631.140	-	25.507.845	136	43.408.500	57	50.121.000	107	191.092.900	300	310.130.245	100,00%	95,53%
	Jumlah siaran radio (Kali)	6200		1.399		1.379		1.460		1.735		5.973			96,34%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,75%	94,61%
													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.952.853.600		-		1.284.597.552		-		1.565.628.448		2.850.226.000		96,52%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	2.881.153.600	40	-	50	1.284.597.552	70	-	100	1.502.653.448	100	2.787.251.000	100,00%	96,74%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan jaringan intra Pemerintah Daerah (SKPD)	31	2.881.153.600	30	-	30	1.284.597.552	30	-	31	1.502.653.448	31	2.787.251.000	100,00%	96,74%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (%)	100	71.700.000	-	-	20	-	45	-	100	62.975.000	100	62.975.000	100,00%	87,83%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi penunjang e-government yang dikembangkan (Aplikasi)	2	71.700.000	-	-	-	-	-	-	2	62.975.000	2	62.975.000	100,00%	87,83%
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	96,52%
													Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			49.805.090		-		-		-		47.370.000		47.370.000		95,11%

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut (%)	100	49.805.090	-	-	20	-	30	-	100	47.370.000	100	47.370.000	100,00%	95,11%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah cetak dokumen statistik sektorai daerah (131 Eksemplar)	100	49.805.090	-	-	-	-	-	-	100	47.370.000	100	47.370.000	100,00%	95,11%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,11%	
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>															
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			49.971.151								37.293.750		37.293.750		74,63%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah (Layanan)	1	49.971.151	-	-	-	-	-	-	1	37.293.750	1	37.293.750	100,00%	74,63%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat (Aplikasi)	1	49.971.151	-	-	-	-	-	-	1	37.293.750	1	37.293.750	100,00%	74,63%
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	74,63%	
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang	
<b>10.474.476.919</b>			<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>99,49%</b>
			<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>Sangat Tinggi</b>
															<b>Sangat Tinggi</b>

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Pelaihari, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tanah Laut



NIP. 19630720 198503 1 015

**Tabel Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2022**

NO	SARGIS	SARGIS BERORIEN TASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALI TAS (Y/T)	IKU/BU KAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		KET.				
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN	TERKAIT	TIDAK TERKAIT					
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Y	Percentase informasi yang disebarluaskan	Y	IKU	1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tercapainya pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Percentase informasi yang disebarluaskan	Y				Y										
											Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Umum/Kabupaten Tanah Laut	Jumlah informasi yang disebarluaskan		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Media Informasi Publik	2.096.250.150						
															Pelayanan Informasi Publik	Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	- Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui PPID dan Radio	324.631.140						
2	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Y	Percentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Y	IKU	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya persandian dalam pengamanan informasi di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Percentase SKPD terhadap keamanan informasi	Y				Y	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah SKPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi							
															Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah aplikasi Sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat	49.971.151						
3	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	Percentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	IKU	4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tercapainya SKPD yang terintegrasi dalam jaringan TIK	Percentase SKPD yang menerapkan SPBE	Y				Y	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat	Jumlah SKPD yang menggunakan Jaringan E-government							
															Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan ke dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600						
															Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	71.700.000						
4	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	T	Percentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	T	BUKAN IKU	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Y				T	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Percentase terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah							
															Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah jenis bahan dan peralatan komponen listrik kantor	5.339.079						
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah jenis belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan	35.939.516						
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	16.809.464						
															Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kominfo	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	13.000.000						
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah rapat dan koordinasi yang terlaksana	196.000.000						
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Percentase terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	T						
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah rekening listrik yang terbayar							
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah jenis administrasi umum yang terpenuhi							
																		594.596.970						



December 2023

Desember 2022

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

MANUKASI

MR. 19640003 198703 1 030

WIF: 198-00002 1987/3 1020

卷之三